

TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG *DOI' NAI'* DALAM PERKAWINAN
ADAT *AMMATOA* DESA TANAH *TOWA* KECAMATAN KAJANG
KABUPATEN BULUKUMBA



Skripsi

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar
Sarjanah Hukum (S.H) Prodi Hukum Acara Peradilan dan Kekeluargaan Jurusan
Peradilan pada Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Alauddin Makassar

Oleh:

SUMARNI

NIM: 10100113108

Pembimbing:

1. Dr. Muhammad Sabri, M.Ag.
2. Drs. H. Syamsuddin R., M.Hi.

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN ALAUDDIN MAKASSAR

2017

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Sumarni
NIM : 10100113108
Tempat/tanggal lahir : Tanah Towa, 02 Juni 1993
Jur/prodi/konsentarsi : Peradilan Agama/Peradilan/SI
Fakultas/program : Syari'ah dan Hukum/SI
Alamat : BTN Cahaya Bukit Samata Blok B No. 6
Judul : Tinjauan Hukum Islam Tentang *Doi' Nai'* Dalam
Perkawinan Adat *Ammatoa* Desa Tanah Towa
Kecamatan Kabupaten Bulukumba.

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagai atau keseluruhannya, maka skripsi ini dan gelar diperoleh karenanya batal demi hukum.

Makassar, 06 Juni 2017

Penyusun



Sumarni

10100113108

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul, “TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG *DOI' NAI'* DALAM PERKAWINAN ADAT *AMMATOA* DESA TANAH *TOWA* KECAMATAN KAJANG KABUPATEN BULUKUMBA”, yang disusun oleh SUMARNI, NIM: 10100113108, mahasiswa Prodi Hukum Acara Peradilan dan Kekeluargaan, Jurusan Peradilan pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *munāqasyah* yang diselenggarakan pada hari Rabu, tanggal 02 Agustus 2017 M, bertepatan dengan tanggal 09 Zulqaidah 1438 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) dalam ilmu Syari'ah dan Hukum, Jurusan Peradilan (dengan beberapa perbaikan).

Makassar, 09 Agustus 2017 M.
17 Zulqaidah 1438 H.

DEWAN PENGUJI:

Ketua	: Prof. Dr. Darussalam, M.Ag.	(.....)
Sekretaris	: Dr. H. Supardin, M.H.I.	(.....)
Munaqisy I	: Drs. Hadi Daeng Mapuna, M.Ag.	(.....)
Munaqisy II	: Andi Intan Cahyani, S.Ag., M.Ag.	(.....)
Pembimbing I	: Dr. Muhammad Sabri, M.Ag.	(.....)
Pembimbing II	: Drs. H. Syamsuddin R., M.H.I.	(.....)



Disahkan oleh:
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Alauddin Makassar,

Prof. Dr. M. Darussalam, M.Ag.
NIP. 196210161990031003

KATA PENGANTAR

Assalamu'alikum Wr.Wb.

Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian dan penyusunan skripsi ini dengan baik, semoga limpahan rahmatnya dan hidayah-Nya selalu menyertai dalam lindungan-Nya. Semoga shalawat dan salam selalu tercurah keharibaan Rasulullah Muhammad saw, bershalawat kepadanya menjadi ungkapan terima kasih dan rasa cinta kepada Nabi besar Muhammad saw, atas perjuangannya, sehingga nikmat Islam masih dapat dirasakan sampai saat ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa memulai hingga mengakhiri proses penyusunan skripsi ini bukanlah hal seperti membalikkan telapak tangan. Ada banyak Kendala dan cobaan yang dilalui. Meskipun diakui penyelesaian skripsi ini membutuhkan waktu yang cukup lama dan jauh dari kesempurnaan yang diharapkan, basik dari segi teoretis, maupun dari pembahasan hasil penelitiannya. Namun, dengan ketekunan dan kerja keraslah yang menjadi pendorong sang penulis dalam menyelesaikan segala proses tersebut. Juga berkat adanya berbagai bantuan moril dan materil dari berbagai pihak yang telah membantu memudahkan penyelesaian dalam penyusunan skripsi ini.

Secara khusus, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tulus dan sebesar-besarnya kepada kedua orang tua tercinta ibunda Habiah dan Ayahanda Laling yang telah mempertaruhkan seluruh hidupnya untuk kesuksesan anaknya,

yang telah melahirkan, membesarkan dan mendidik dengan sepenuh hati dengan buaian kasih sayang kepada penulis.

Selama menempuh studi maupun dalam proses perampungan dan penyelesaian skripsi ini, tidak lepas dari bantuan, motivasi dan bimbingan dari sebagai pihak. Untuk itu, dengan penuh ketulusan penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Musafir Pababbari, M.Si, Rektor UIN Alauddin Makassar beserta wakil Rektor UIN Alauddin Makassar.
2. Prof. Dr. Darussalam, M. Ag. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum dan para wakil Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum.
3. Dr. H. Supardin. M.H.I dan Dr. Fatimah, M.Ag. selaku Ketua dan Sekretaris Jurusan Peradila Agama UIN Alauddin Makassar.
4. Dr. Muhammad Sabri, M.Ag. dan Drs. H. Syamsuddin R., M.H.I. selaku pembimbing I dan II yang telah memberikan arahan dan koreksi dalam menyusun skripsi ini dan membimbing penulis sampai taraf penyelesaian.
5. Para Dosen, dan Karyawan dan karyawan Fakultas Syari'ah dan Hukum yang secara konkrit memberikan bantuannya baik langsung maupun tidak langsung.
6. Dan yang terpenting skripsi ini penulis persembahkan kepada kedua orang tua penulis yang tercinta, Ayahanda Laling dan Ibunda Habiah sebagai ungkapan terima kasih tak terhingga karena telah membesarkan dan mendidik penulis dengan penuh kasih sayang. Serta memberikan semangat

kepada penulis dan juga memberikan doa, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar.

7. Roslina, Wawan Amriyanto dan Lhisa, kakakku yang tercinta yang telah memberikan motivasi, dorongan dan bantuan sehingga penulis menyelesaikan skripsi ini.

8. Kepada teman-teman Peradilan Agama angkatan 2013 terutam PA C atas keikhlasan dan dorongan selama penulis menempuh pendidikan dibangku kuliah, semoga rasa solidaritas kita jangan sampai terlupakan.

Tiada balasan yang dapat diberikan penulis, kecuali kepada Allah Swt penulis harapkan balasan dan semoga bernilai pahala disisi-Nya. *Amin Ya Rabbal Alamin.*

Semoga skripsi ini bermanfaat bukan hanya penulis, tapi juga untuk masyarakat luas.

Samata, 06 Juni 2017
Penulis

Sumarni
Nim.10100113108

DAFTAR ISI

JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI.....	v
PEDOMAN TRASNSLITERASI.....	vi
ABSTRAK	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus	7
D. Kajian Pustaka.....	8
E. Tujuan dan Kegunaan	10
BAB II TINJAUAN TEORETIS	11
A. Pengertian.....	11
1. Khitbah.....	11
2. Hukum Memandang Wanita Khitbah	11
3. Empat Mata (Berduaan) dengan Wamita Khitbah	13
B. Pengertian.....	14
1. Perkawinan.....	14
2. Tujuan, Rukun dan Syarat Sah Perkawinan	15
C. Pengertian dan Dasar Hukum Mahar	22
1. Mahar dan Dasar Hukum Mahar.....	22

2. Syarat-Syarat, Macam-Macam, Bentuk, dan Jumlah Mahar	24
3. Pelaksanaan pemberian Mahar.....	27
D. Sejarah Doi' Nai' dalam Perkawinan Adat Ammatoa	28
E. Pengertian Sompang dan Doi' Nai', serta Perbedaannya dengan Mahar	29
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	34
A. Jenis dan Lokasi Penelitian	34
B. Pendekatan Penelitian.....	34
C. Sumber Data	35
D. Metode Pengumpulan Data	35
E. Instrumen Penelitian.....	37
F. Teknik Pengolahan dan Analisa Data	37
G. Pengujian Keabsahan Data	38
BAB IV HASIL PENELITIAN	40
A. Profil Lokasi Penelitian	40
1. Kondisi Geografis Desa Tanah Towa	40
2. Kondisi Masyarakat di Kawasan Adat Ammatoa Desa Tanah Towa	43
3. Gambaran Sejarah Terbentuknya Kawasan Adat Ammatoa	48
B. Kedudukan dan Akibat Hukum Doi' Nai' dalam Perkawinan Adat Ammatoa Desa Tanah Towa Kec. Kajang Kab. Bulukumba.....	48
C. Tinjauan Hukum Islam tentang Doi' Nai' dalam Perkawinan Adat Ammatoa Desa Tanah Towa Kec. Kajang Kab. Bulukumba.....	57
BAB V PENUTUP	66
A. Kesimpulan.....	67
D. Implikasi Penelitian	67

KEPUSTAKAAN	68
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

Transliterasi Arab-Latin

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut :

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	a	tidak dilambangkan
ب	ba	b	Bc
ت	ta	t	tc
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ḥa	ḥ	ha (dengan titik dibawah)
خ	kha	k	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	z	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	s	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	apostrof terbalik
غ	gain	g	ge

ف	fa	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	wau	w	we
هـ	ha	y	ha
ء	hamzah	‘	apostrof
ي	ya	y	ye

Hamzah (ء) yang terletak diawal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (‘).

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	<i>fathah</i>	a	A
إ	<i>kasrah</i>	i	I
أ	<i>ḍammah</i>	u	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gambar huruf, yaitu :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ئ	<i>fathah dan yā'</i>	Ai	a dan i
و	<i>fathah dan wau</i>	Au	a dan u

Contoh :

كَيْفَ : *kaifa*

هَوْلَ : *hauula*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
...اَ...ئ...	<i>Fathah dan alif atau ya'</i>	A	a dan garis di atas
ئ	<i>Kasrah dan ya'</i>	I	i dan garis di atas
وُ	<i>Dammah dan wau</i>	U	u dan garis di atas

Contoh

مَاتَ : *mata*

رَمَى : *rama*

قِيلَ : *qila*

يَمُوتُ : *yamutu*

4. Tā'marbū'ah

Transliterasi untuk tā' marbūtah ada dua, yaitu: tā' marbūtah yang hidup Ta'marbutah yang hidup (berharakat fathah, kasrah atau dammah) dilambangkan dengan huruf "t". ta'marbutah yang mati (tidak berharakat) dilambangkan dengan "h".

Contoh:

رَوَضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudal al-at fal*
الْمَدِينَةُ الْفَادِلَةُ : *al-madinah al-fadilah*
الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

A. Syaddah (Tasydid)

Tanda Syaddah atau tasydid dalam bahasa Arab, dalam transliterasinya dilambangkan menjadi huruf ganda, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah tersebut.

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbana*
نَجَّيْنَا : *najjainah*

B. Kata Sandang

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyi huruf yang ada setelah kata sandang. Huruf "l" (ل) diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang tersebut.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya.

Contoh:

الْفَلَسَفَةُ : *al-falsafah*
الْبِلَادُ : *al-biladu*

C. Hamzah

Dinyatakan di depan pada Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrop. Namun, itu apabila hamzah terletak di tengah dan akhir kata. Apabila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

1. Hamzah di awal

أُمِرْتُ : *umirtu*

2. Hamzah tengah

تَأْمُرُونَ : *ta' muruna*

3. Hamzah akhir

شَيْءٌ : *syai'un*

D. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasinya penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara; bisa terpisah per kata dan bisa pula dirangkaikan.

Contoh:

Fil Zilal al-Qur'an

Al-Sunnah qabl al-tadwin

E. Lafz al-Jalalah (اللهُ)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilahi* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

اللّٰهُمَّ *Dinullah billah*

Adapun ta’ marbutah di akhir kata yang di sandarkan kepada lafz al-jalalah, ditransliterasi dengan huruf [t].

Contoh:

هُمَّ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ *Hum fi rahmatillah*

F. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf kapital dipakai. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD. Di antaranya, huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal dan nama diri. Apabila nama diri didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal dari nama diri tersebut, bukan huruf awal dari kata sandang.

Contoh: *Syahru ramadan al-lazi unzila fih al-Qur’an*

Wa ma Muhammadun illa rasul

ABSTRAK

Nama : Sumarni
Nim : 10100113108
Judul : Tinjauan Hukum Islam tentang *Doi' Nai'* dalam Perkawinan Adat *Ammatoa* Desa Tanah Towa Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba

Pokok permasalahan penelitian ini adalah Bagaimana perihal pemberian *Doi' Nai'* dalam Perkawinan Adat *Ammatoa* Desa Tanah Towa Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : 1) Bagaimana kedudukan dan akibat hukum *doi' nai'* dalam perkawinan Adat *Ammatoa* Desa Tanah Towa Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba, 2) Bagaimana Tinjauan hukum Islam tentang *doi' nai'* dalam Perkawinan Adat *Ammatoa* Desa Tanah Towa Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba

Penyusunan skripsi ini jenis kualitatif dengan pendekatan yuridis syari'ah, serta melalui informan (masyarakat *Ammatoa* Desa Tanah Towa Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba), selanjutnya metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi mengenai tinjauan hukum islam tentang *doi' nai'* dalam perkawinan Adat *Ammatoa* Desa Tanah Towa Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba. Selanjutnya berdasarkan data dari hasil wawancara yang ada, penulis berusaha menarik kesimpulan dari fakta-fakta yang bersifat khusus menjadi sebuah kesimpulan yang lebih umum. Penelitian ini dilakukan di *Ammatoa* Desa Tanah Towa Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba. Penelitian ini antara hasil hasil wawancara dengan masyarakat *Ammatoa*.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Kedudukan dan Akibat hukum Islam tentang *Doi' Nai'*. Yaitu : Kedudukan *doi' nai'* dalam perkawinan adat *Ammatoa* adalah salah satu prasyarat, karena jika tidak *doi' nai'* maka tidak ada perkawinan. Islam tidak mengatur mengenai ketentuan *doi' nai'* akan tetapi hukumnya mubah. Islam tidak melarang pemberian *doi' nai'* dalam perkawinan adat *Ammatoa* karena tidak ada dalil yang menerangkan hal tersebut. Yang penting pemberian *doi' nai'* tidak bertentangan dengan syari'at dan penentu nilai *doi' nai'* tidak ada unsure keterpaksaan, sesuai kemampuan dan kesanggupan pihak laki-laki. Adapun dampak dari tingginya penentu jumlah *doi' nai'* yaitu batal menikah, hubungan antara kedua keluarga bisa menjadi renggan, banyak laki-laki yang enggang menikah, banyak perawan tua, silariang, bahkan bisa fatal bagi laki-laki karena dengan sengaja menghamili perempuan yang ingin dinikahi. Tinjauan hukum Islam tentang *Doi' nai'* yaitu tidak ada ketentuan yang mengatur tentang *Doi' nai'* dalam Islam. Akan tetapi hukumnya mubah, yang artinya boleh dilaksanakan karena tidak ada dalil yang melarang. Jadi dikembalikan pada tradisi setempat, dan dalam proses pelaksanaannya tidak ada unsur paksaan, tergantung kesanggupan dan kemampuan. Yang penting dalam masyarakat *Ammatoa sitinajai*.

Implikasi dalam penelitian adalah: Agar kiranya kepada masyarakat Ammatoa hendaknya lebih memahami lagi masalah-masalah yang berkaitan dengan hukum perkawinan Islam agar tidak menganggap bahwa pemberian *doi' nai'* merupakan pemberian wajib melainkan hanya berupa hadiah yang diberikan mempelai laki-laki kepada mempelai wanita sebagai rasa hormat dan untuk membantu membiayai kelancaran jalannya proses resepsi pernikahan.

BAB I

PEDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan salah satu unsur yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Perkawinan merupakan unsur yang akan meneruskan kelangsungan kehidupan manusia dan masyarakat di bumi ini, perkawinan menyebabkan adanya keturunan dan keturunan akan menimbulkan keluarga yang nantinya akan berkembang menjadi kerabat dan masyarakat, oleh karena itu keberadaan ikatan sebuah perkawinan perlu dilestarikan demi tercapainya tujuan yang dimaksudkan dalam perkawinan itu sendiri.

Adapun dalam perkawinan terdapat beberapa unsur yang harus terpenuhi demi kelancaran perkawinan tersebut, diantaranya adalah rukun dan syarat. Rukun dan syarat menentukan suatu perbuatan hukum, terutama yang menyangkut dengan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dari segi hukum. Kedua kata tersebut mengandung arti yang sama dalam hal bahwa keduanya merupakan sesuatu yang harus terpenuhi.

Dalam suatu acara perkawinan umpamanya rukun dan syaratnya tidak boleh tertinggal, dalam arti perkawinan tidak sah bila keduanya tidak ada atau tidak lengkap. Keduanya mengandung arti yang berbeda dari segi bahwa rukun itu adalah sesuatu yang berada di dalam hakikat dan merupakan bagian atau unsur yang mewujudkannya, sedangkan syarat adalah sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam pekerjaan itu, seperti menutup aurat atau shalat atau menurut islam calon pengantin laki-laki/perempuan itu harus beragama Islam.

Syarat itu ada yang berkaitan dengan rukun dalam arti syarat yang berlaku untuk setiap unsur yang menjadi rukun.

Ada pula syarat itu berdiri sendiri dalam arti tidak merupakan criteria dari unsur- unsur rukun.

Dalam hal hukum perkawinan, dalam menempatkan mana yang rukun dan mana yang syarat terdapat perbedaan di kalangan ulama yang perbedaan ini tidak bersifat substansial. Perbedaan di antara pendapat tersebut disebabkan oleh karena berbeda dalam melihat focus perkawinan itu. Semua ulama sependapat dalam hal-hal yang terlibat dan yang harus ada dalam suatu perkawinan adalah: akad perkawinan, laki-laki yang akan kawin, perempuan yang akan kawin, wali dari mempelai perempuan, saksi yang akan menyaksikan akad perkawinan, dan mahar atau maskawin.¹

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas maka rukun perkawinan secara lengkap adalah sebagai berikut:

- a. Calon mempelai laki-laki;
- b. Calon mempelai perempuan;
- c. Wali dari mempelai perempuan;
- d. Dua orang saksi;
- e. Ijab dan qabul.

Mahar yang harus ada dalam setiap perkawinan tidak termasuk ke dalam rukun, karena mahar tersebut tidak mesti disebut dalam akar perkawinan dan tidak

¹Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 59-61

mesti diserahkan pada waktu akad itu berlangsung. Dengan demikian, maka mahar itu tersebut kedalam syarat perkawinan.

Dari penjelasan tersebut di atas dapat di tarik kesimpulan bahwa hukum pemberian mahar oleh calon suami kepada calon istri adalah wajib, dengan arti laki-laki yang mengawini seorang perempuan wajib menyerahkan mahar kepada istrinya itu dan berdosa suami yang tidak menyerahkan mahar kepada istrinya.

Dasar wajibnya menyerahkan mahar itu di tetapkan dalam Al-Qur'an Surah An-nisa' ayat 4 yang berbunyi:

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا

Terjemahnya:

"Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya".²

Langkah awal dari perkawinan adalah menentukan dan memilih jodoh yang akan hidup bersama dalam perkawinan. Dalam pilihan itu dikemukakan beberapa alternatif atau kriteria untuk dijadikan dasar pilihan.

Setelah mendapatkan jodoh sesuai dengan pilihan dan petunjuk agama, tahap selanjutnya menyampaikan kehendak atau melamar jodoh yang telah didapatkan itu. Akibat dari suatu pertunangan adalah satu pihak terikat perjanjian dengan pihak lain. Akibat hukum lain yang timbul disebabkan pertunangan tersebut adalah keharusan memberikan hadiah-hadiah yang mana berbeda-beda menurut adat setempat. Bilamana tidak ada pemberian hadiah maka pertunangan dibatalkan.³

²Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung, Javal Raudhotul Jannah, 2009), h. 115.

³Teer Haar, *Asas-asas dan Susunan Hukum Adat*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1987), h. 167.

Begitupun yang terjadi dalam perkawinan adat Ammatoa kec.kajang kab Bulukumba. Perkawinan adat *Ammatoa* kec. Kajang, Kab. Bulukumba disebut *pa'bungtingan*. *Pa'bungtingan* (perkawinan) merupakan ritual yang sangat sakral dimana ritual tersebut harus dijalani oleh semua orang. Seorang gadis yang telah menginjak usia dewasa seharusnya sudah menikah. Jika tidak demikian maka akan menjadi bahan pembicaraan dikalangan masyarakat luas, sehingga terkadang orang tua mendesak si gadis untuk menikah dengan calon suami pilihan mereka.

Sebelum prosesi *pa'bungtingan* (perkawinan) dilaksanakan, ada beberapa tahap yang harus dilalui oleh calon mempelai laki-laki. Salah satu diantaranya adalah *A'jagang-jagang*/*Ma'manu-manu*, *A'suro*/*Massuro*, dan *Appa'nasa*/*Patenre Ada*. *A'jagang-jagang* adalah penyelidikan secara diam-diam oleh pihak calon mempelai pria untuk mengetahui latar belakang pihak calon mempelai wanita. *A'suro* adalah acara pinangan secara resmi pihak calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita. *Appa'nasa* yaitu menentukan hari pernikahan. Sekaligus penentuan pemberian *Doi' Nai'* yang akan diberikan oleh calon mempelai laki-laki kepada pihak keluarga calon mempelai wanita apabila lamaran tersebut diterima *Doi' Nai'* adalah sejumlah uang yang wajib diserahkan oleh calon mempelai suami kepada pihak keluarga calon istri, yang akan digunakan sebagai biaya dalam resepsi perkawinan dan belum termasuk mahar.

Masyarakat *Ammatoa* Kec. Kajang, Kab. Bulukumba dan khususnya bagi masyarakat Desa Tanah Towa, Kec Kajang menganggap bahwa pemberian *Doi' Nai'* dalam perkawinan adat mereka adalah suatu kewajiban yang tidak biasa diabaikan. Tidak ada *Doi' Nai'* berarti tidak ada perkawinan.

Masyarakat Desa Tanah Towa beranggapan bahwa kewajiban atau keharusan memberikan *Doi' Nai'* sama seperti kewajiban memberikan mahar. Hal ini terjadi karena antara *Doi' Nai'* dan mahar adalah merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Seorang calon suami yang memberikan uang panaik kepada pihak keluarga calon istri bukan berarti secara langsung telah memberikan mahar. Karena uang panaik tersebut belum termasuk mahar. Sehingga jika *Doi' Nai'* tidak ada maka perkawinan pun tidak akan pernah terjadi.

Jika dalam perkawinan adat desa lain *doi' nai'* tersebut diberikan kepada calon istri, sebaliknya dalam perkawinan adat *Ammatoa*. Istri justru tidak tahu menahu dan tidak ikut campur dalam proses pemberian dan penentuan uang panaik. Karena yang sangat berperan dalam proses tersebut justru orang yang dituakan dari pihak keluarga calon istri. *Doi' nai'* tersebut tidak akan diberikan kepada calon istri sedikit pun. Karena uang panaik tersebut khusus digunakan untuk biaya resepsi perkawinan.

Doi' nai' yang diberikan oleh calon suami jumlahnya lebih banyak daripada mahar. Adapun kisaran jumlah *doi' nai'* dimulai dari 45 juta, 50, 55 dan bahkan ratusan juta. Hal ini dapat dilihat ketika prosesi akad nikah yang hanya menyebutkan mahar dalam jumlah yang kecil.

Terkadang karena tingginya *Doi' Nai'* yang dipatok oleh pihak keluarga calon istri, sehingga dalam kenyataannya banyak pemuda yang gagal menikah karena ketidak mampuannya memenuhi *Doi' Nai'* yang dipatok, sementara pemuda dan si gadis telah lama menjalin hubungan yang serius. Dari sinilah terkadang muncul apa yang disebut silariang atau kawin lari.

Adapun penyebab tingginya jumlah *Doi' Nai'* tersebut disebabkan karena beberapa faktor diantaranya: Status sosial calon istri. Semakin kaya wanita yang akan dinikahi, maka semakin banyak pula *Doi' Nai'* yang harus diberikan oleh calon suami kepada pihak keluarga calon istri.

Faktor lain yang mempengaruhi tingginya jumlah *Doi' Nai'* yang harus dikeluarkan adalah tinggi rendahnya jenjang pendidikan calon istri. Semakin tinggi tingkat pendidikan seorang perempuan maka semakin banyak pula *Doi' Nai'* yang harus diberikan dan jika tidak memberikan uang panai dalam jumlah yang banyak maka akan mendapatkan hinaan dari masyarakat. Karena masyarakat *Ammatoa* beranggapan bahwa keberhasilan mematok *doi' nai'* dengan harga yang tinggi adalah suatu kehormatan tersendiri. Karena tingginya *Doi' Nai'* akan berdampak pada kemeriahan, kemegahan dan banyaknya tamu undangan dalam perkawinan tersebut.

Kebiasaan inilah yang berlaku pada masyarakat *Ammatoa* di Desa Tanah Towa sejak lama dan turun menurun dari satu periode ke periode selanjutnya sampai sekarang.

Pada hakikatnya dalam hukum perkawinan islam tidak ada kewajiban untuk memberikan *Doi' Nai'*, kewajiban yang ada dalam perkawinan Islam hanya memberikan mahar kepada calon istri. Oleh karena itu penulis tertarik untuk menulis skripsi yang berjudul "**Tinjauan Hukum Islam Tentang *Doi' Nai'* Dalam Perkawinan Adat *Ammatoa* Desa Tanah Towa kec. Kajang, Kab. Bulukumba.**

B. Rumusan Masalah

Setelah mencermati permasalahan berkaitan dengan *doi' nai'*, maka permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Kedudukan dan Akibat hukum *Doi' Nai'* dalam perkawinan adat *Ammatoa* Desa Tanah Towa Kec. Kajang, Kab. Bulukumba?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam tentang *Doi' Nai'* dalam perkawinan adat *Ammatoa* Desa Tanah Towa Kec. Kajang, Kab. Bulukumba?

C. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus

1. Fokus Penelitian

Agar menghindari kekeliruan penafsiran terhadap pengertian yang sebenarnya, maka penulis menjelaskan beberapa kata dalam judul skripsi sebagai berikut:

Hukum Islam adalah peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan berkenaan dengan kehidupan berdasarkan Al-Qur'an dan As-Sunnah atau disebut juga hukum syara.⁴ Hukum islam yang dimaksud dalam penelitian ini adalah hukum Islam yang berdasarkan pada kitab-kitab fiqhi klasik.

Doi' Nai', yaitu sejumlah uang yang wajib diberikan oleh calon suami kepada calon pihak keluarga calon istri, yang akan digunakan sebagai biaya dalam resepsi perkawinan.

Perkawinan Adat, yaitu ikatan hidup bersama antara seorang pria dan wanita, yang bersifat komunal dengan tujuan mendapatkan generasi penerus agar supaya kehidupan persekutuan atau clannya tidak punah, yang didahului dengan rangkaian upacara adat.⁵ perkawinan adat yang dimaksud adalah perkawinan Adat *Ammatoa* Desa Tanah Towa Kec. Kajang Kab. Bulukumba.

⁴Sudarsono, *Kamus Besar*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), h. 169.

⁵Arya Astra, "*Pergertian Perkawinan Adat*", dalam [http://www. Hukumhindu. Or.id/Pengertian- Adat/](http://www.Hukumhindu.Or.id/Pengertian-Adat/), (16 Januari 2017).

Jadi pengertian judul yang dimaksud dalam skripsi ini adalah tinjauan hukum islam tentang *Doi' Nai'* dalam perkawinan adat *Ammatoa*.

2. Deskripsi Fokus

Penelitian ini berjudul “Tinjauan Hukum Islam Tentang *Doi' Nai'* dalam Perkawinan Adat *Ammatoa* Desa Tanah Towa Kec, Kajang Kab. Bulukumba”.

D. kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah deskripsi tentang kajian atau penelitian yang sudah pernah dilakukan, sehingga terlihat jelas bahwa kajian ini bukan pengulangan atau duplikasi dari kajian terdahulu. Secara langsung penulis tidak menemukan kajian atau penelitian yang bersinggungan langsung dengan perihal pemberian *Doi' Nai'* khususnya pada masyarakat *Ammatoa*. Akan tetapi pemberian *Doi' Nai'* ini terdapat pula diberbagai masyarakat adat di Indonesia.

Berdasarkan temuan penulis ada beberapa penelitian yang serupa dengan skripsi ini yaitu:

1. Buku yang dikarang oleh A. Rachman dan Aminah Hamzah, “Adat dan Upacara Perkawinan Daerah Sulawesi Selatan. Buku ini membahas tentang perkawinan daerah Sulawesi Selatan diantaranya suku Bugis, Makassar, Mandar, dan Tanah Toraja. Secara umum dalam buku ini dibahas mengenai adat dan upacara sebelum perkawinan sampai adat dan upacara setelah perkawinan.
2. Skripsi yang disusun oleh Akhmad Affandi yang berjudul “Tinjauan hukum Islam terhadap tradisi "jujuran" dan implikasinya dalam perkawinan adat patrilineal”. Penelitian ini menitik beratkan pada implikasi dari pemberian “jujur” yang berdampak pada putusnya hubungan istri dari keluarganya.

3. Skripsi yang disusun oleh Sa'diyah yang berjudul "Motivasi calon istri memberikan dana kepada calon suami sebagai jujuran di kota Banjarmasin". Penelitian ini lebih fokus kepada motivasi seorang calon istri untuk memberikan jujuran baik itu setengah atau seluruh dari nilai uang jujuran.
4. Skripsi yang disusun oleh Hilmiyani yang berjudul "Tinjauan hukum Islam terhadap persepsi masyarakat tentang pemberian uang jujuran dalam perkawinan adat banjar di desa batu balian kec. simpang empat kab. Banjar kalsel". Penelitian ini menitik beratkan pada persepsi masyarakat Banjar di Desa Batu Balian Kec. Simpang Empat Kab. Banjar Kalsel mengenai pemberian Uang Jujuran dalam perkawinan adat setempat.

Dari kajian tersebut di atas tentu memiliki titik singgung dengan penelitian ini. Kajian ini memiliki perbedaan dengan kajian sebelumnya. Adapun letak perbedaannya antara lain:

1. Penelitian ini dilakukan dalam lingkungan masyarakat adat *Ammatoa* Desa Tanah Towa Kec. Kajang Kab. Bulukumba.
2. Penelitian ini mengkaji tentang tinjauan hukum Islam terhadap perihal pemberian *doi' nai'* dalam perkawinan adat *Ammatoa* Desa Tanah Towa Kec. Kajang Kab. Bulukumba.

Penelitian terhadap permasalahan yang berkaitan dengan perihal pemberian *Doi' Nai'* ini dipandang urgen karena berdasarkan pada kenyataan yang ada dalam *Ammatoa* Kec. Kajang Kab. Bulukumba.

Padahal dalam Hukum Perkawinan Islam itu bukan merupakan salah satu rukun maupun syarat. Dan masalah ini lebih menarik lagi karena sebagian besar masyarakat setempat adalah beragama Islam. Dan pemberian *Doi' Nai'* ini sudah

menjadi adat kebiasaan yang turun temurun dan tidak bisa ditinggalkan karena mereka telah menganggap bahwa *Doi' Nai'* merupakan suatu kewajiban dalam perkawinan.

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dipaparkan di atas maka melalui penelitian ini penulis bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui kedudukan *Doi' Nai'* dalam perkawinan adat *Ammatoa* Desa Tanah Towa Kec. Kajang, Kab. Bulukumba.
2. Menganalisis dengan hukum Islam tentang *Doi' Nai'* dalam perkawinan Adat *Ammatoa* Desa Tanah Towa Kec. Kajang, Kab. Bulukumba.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam dua aspek berikut:

1. Aspek teoritis

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan bagi peneliti selanjutnya dan dapat pula dijadikan bahan masukan dalam memahami tentang perihal pemberian *Doi' Nai'* dalam perkawinan Adat *Ammatoa* Desa Tanah Towa Kec. Kajang, Kab. Bulukumba dan khususnya bagi masyarakat Desa Tanah Towa Kec. Kajang, Kab. Bulukumba.

2. Aspek praktis

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi masyarakat *Ammatoa* dan khususnya Desa Tanah Towa, Kec. Kajang, Kab. Bulukumba dalam pelaksanaan perkawinan adat tentang *Doi' Nai'*.

BAB II

TINJAUAN TEORETIS

A. Khitbah

1. Pengertian Khitbah

Sudah menjadi kodrat manusia menjadi makhluk sosial yang saling membutuhkan. Sehingga dalam kehidupan manusia pasti saling ada kenal-mengenal antara satu dengan yang lainnya. Dalam hal melaksanakan sebuah pernikahan, sebelumnya pasti ada proses pengenalan antara laki-laki dan perempuan yang hendak melaksanakan pernikahan. Dalam islam proses tersebut dinamakan *khitbah*.

Khitbah adalah permintaan seorang laki-laki untuk menguasai seorang wanita tertentu dari keluarganya dan bersekutu dalam urusan kebersamaan hidup. Atau dapat diartikan pula, seorang laki-laki menampakkan kecintaanya untuk menikah seorang wanita yang halal dinikahi secara syara'. Diantara hal yang disepakati mayoritas ulama fiqh, syari'at dan perundang-undangan bahwa tujuan pokok khitbah adalah berjanji akan menikah, belum ada akad nikah.⁶

2. Hukum Memandang Wanita Khitbah

Syari'at Islam membolehkan seorang laki-laki memandang wanita yang akan dinikahi, bahkan dianjurkan dan disunnahkan karena pandangan peminang terhadap terpinang merupakan bagian dari sarana keberlangsungan hidup pernikahan dan ketentraman.

Syari'at islam memperbolehkan memandang terhadap wanita terpinang, padahal asalnya haram memandang wanita lain yang bukan mahram. Hal ini

⁶Abd Aziz Muhammad Azzam, Abdul Wahhab Sayyid Wawwas, *Fiqh Munakahat; Khitbah, Nikah, dan Talak, Amzah*, (Jakarta, 2009),h. 8.

didasarkan pada kondisi darurat, yakni unsure keterpaksaan untuk melakukan hal tersebut karena masing-masing calon pasangan memang harus mengetahui secara jelas orang yang akan menjadi teman hidup dan secara khusus perilakunya.

Dengan membolehkan memandang wanita terpinang tersebut, adapun batasan-batasan bagian tubuh mana mana saja yang boleh dipandang. Adapun anggota tubuh wanita terpinang yang boleh dipandang menurut beberapa fuqaha antara lain: ⁷

- a. Mayoritas fuqaha seperti Imam Malik, Asy Syafi'I, dan Ahmad dalam satu pendapatnya mengatakan bahwa anggota tubuh wanita terpinang yang boleh dilihat hanyalah wajah dan kedua telapak tangan. Wajah tempat menghimpung segala kecantikan dan mengungkap banyak nilai-nilai kejiwaan, kesehatan dan akhlak. Sedangkan kedua telapak tangan dijadikan indicator kesuburan badan, gemuk dan kurusnya. Wajah menunjukkan keindahan dan kecantikan, sedangkan kedua telapak tangan menunjukkan kehalusan kelemahan tubuh seseorang.
- b. Ulama Hanabillah berpendapat bahwa batas kebolehan memandang anggota tubuh wanita terpinang sebagaimana memandang wanita mahram, yaitu apa yang Nampak pada wanita pada umumnya disaat bekerja dirumah seperti wajah, kedua telapak tangan, leher, kepala, kedua tumit kaki dan sesamanya.
- a. Ulama Hanafiyah dan Hanabillah berpendapat, kadar anggota tubuh yang boleh dilihat adalah wajah, kedua telapak tangan dan kedua kaki, tidak lebih dari itu. Memandang anggota tubuh tersebut dinilai cukup bagi orang yang ingin mengetahui anggota tubuhnya.

⁷Abd Aziz Muhammad Azzam, Abdul Wahhab Sayyid Hawwas, *Fiqh...*,h. 11-13

3. Empat Mata (Berduaan) dengan Wanita Khitbah

Syari'at Islam memperbolehkan laki-laki melihat wanita terpinang, demikian juga wanita terpinang boleh melihat laki-laki peminang. Penglihatan masing-masing ini dimaksudkan agar saling memahami dan menerima sebelum melangkah ke pernikahan. Kebolehan tersebut hanya pada saat khitbah. Oleh karena itu, peminang tidak boleh bersunyanempak mata dengan wanita terpinang, tidak boleh pergi bersama, keluar untuk rekreasi dan lain-lain kecuali disertai dengan mahram (saudara). Hal tersebut untuk menolak fitnah, menjauhi tempat-tempat keraguan, memelihara kemuliaan dan kehormatan gadis, sungguh-sungguh memelihara masa depan dan menjaga kehormatan keluarganya. Fuqaha telah sepakat bahwa pandangan peminang terhadap wanita terpinang tidak boleh ditempat sunyi karena bersunyan antara laki-laki dan wanita haram akan menimbulkan perbuatan yang diinginkan oleh Agama (maksiat/zina).

Syari'at Islam memperbolehkan melihat wanita terpinang karena maslahat, sedangkan segala bentuk yang menimbulkan bencana atau kerusakan (mafsadat) terlarang. Oleh karena itu, tidak boleh melihat wanita terpinang ditempat sepi atau tanpa disertai salah seorang keluarga (mahram). Bersepi dengan wanita lain haram hukumnya, kecuali bagi mahram atau suami sendiri. Asumsi diperbolehkan pacaran bergaul bebas, dan bersepi dengan maksud mengetahui sifat dan karakter calon teman pasangannya sebelum menikah adalah Asumsi batil, tidak benar. Hal tersebut dikarenakan masing-masing individu dan membebani teman calon pasangannya berdiri diluar karakter dan menampilkan dirinya tidak seperti biasa. Dari keterangan tersebut telah jelas bahwa Allah SWT ketika mengharamkan sesuatu sesungguhnya karena keharaman itu dapat menimbulkan bencana kepada hambanya.

B. Pengertian

1. perkawinan

Perkawinan atau pernikahan merupakan *sunnatullah* yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya, baik ada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Ia adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah Swt, sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak, dan melestarikan hidupnya.⁸

Nikah, menurut bahasa : *al-jam'u* dan *al-dhamu* yang artinya kumpul.⁹ Makna nikah (*zawajj*) bisa diartikan dengan *aqdu al-tazwij* yang artinya akad nikah. Juga bisa diartikan (*wath'u al-zaujah*) yang artinya menyetubui istri. Definisi yang hampir sama dengan diatas juga dikemukakan oleh Rahmat Hakim, bahwa kata nikah berasal dari bahasa Arab "*nikahun*" yang merupakan masdar atau asal kata dari kata kerja (*fi'il madhi*) "*nikaha*", sinonimnya "*tazawwaja*" kemudian diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagai perkawinan. Kata nikah sering juga dipergunakan sebab telah masuk dalam bahasa Indonesia.

Beberapa penulis juga terkadang menyebut pernikahan dengan kata perkawinan. Dalam bahasa Indonesia, "perkawinan" berasal dari kata "kawin", yang menurut bahasa, artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis; melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh".¹⁰ Istilah "kawin" digunakan secara umum, untuk tumbuhan, hewan, dan manusia, dan menunjukkan proses generative secara alami. Berbeda dengan itu, nikah hanya digunakan pada manusia karena mengandung keabsahan secara hukum nasional, adat istiadat, dan terutama menurut agama. Makna

⁸Slamet Abidin Dan Amiruddin, *Fikih Munakahat I* (Bandung: Pustaka Setia, 1999), h.9; Supiana Dan M,Karman, *Materi Pendidikan Agama Islam* (Bandung: Remaja Rosdayakarya; 2004), Cet Ke-3, h. 125.

⁹Sulaeman Al-Mufarraj, *Bekal Pernikahan: Hukum, Tradisi, Hikma, Kisah, Syair, Wasiat, Kata Mutiara, Alih Bahasa*, Kuais Mandiri Cipta Persada, (Jakarta: Qisthi Press, 2003), h. 5.

¹⁰Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2000), h. 11

nikah adalah akad atau ikatan, karena dalam suatu proses pernikahan terdapat ijab (pernyataan penyerahan dari pihak perempuan) dan Kabul (penyerahan penerimaan dari pihak lelaki). Selain itu, nikah juga bisa diartikan sebagai bersetubuh.¹¹

Dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Pasal 1 disebutkan bahwa: “ perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Dengan demikian pernikahan adalah suatu akad yang secara keseluruhan aspeknya dikandung didalam kata nikah atau *tazwij* dan merupakan ucapan seremonial yang sacral.

2. Tujuan, Rukun dan syarat sah perkawinan

Tujuan perkawinan menurut agama Islam ialah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga; sejahtera artinya terciptanya ketenangan lahir dan batin disebabkan terpenuhinya keperluan hidup lahir dan batinnya, sehingga timbullah kebahagiaan, yakni kasih sayang antar anggota keluarga.¹²

Rumusan tujuan perkawinan diatas dapat diperinci sebagai berikut:¹³

- a. Menghalalkan hubungan kelamin untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan.
- b. Mewujudkan suatu keluarga dengan dasar cinta kasih.
- c. Memperoleh keturunan yang sah.

¹¹Abd. Rahman assegaf, *studi islam konstektual elaborasi paradigma baru muslim kaffa* (Yogyakarta: gama media, 2005), h. 131.

¹²Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, Kencana, Bogor, 2003, h. 22.

¹³Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta, 1892. H. 12.

Dari uraian diatas, Imam Al-Ghasali dalam Ihyahya tentang faedah melangsungkan perkawinan membaginya kedalam lima tujuan, yaitu;¹⁴

- a. Mendapatkan dan melangsungkan keturunan.
- b. Memenuhi hajat manusia untuk menyalurkan syahwatnya dan menumpahkan kasih sayangnya.
- c. Memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan.
- d. Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab menerima hak serta kewajiban, juga bersungguh-sungguh untuk memperoleh harta kekayaan yang halal.
- e. Membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tentram atas dasar cinta dan kasih sayang.

Sulaeman Al-Mufarraj, dalam bukunya bekal pernikahan menjelaskan bahwa ada lima belas tujuan perkawinan yaitu:¹⁵

- a. Sebagai ibadah dan mendekatkan diri pada Allah SWT. Nikah juga dalam rangka taat kepada Allah SWT. Dan Rasul-Nya;
- b. Untuk *'Iffah* (menjauhkan diri dari hal-hal yang dilarang; *Ihsan* membentengi diri) dan *mubadho 'ah* biasa melakukan hubungan intim);
- c. Memperbanyak umat Muhammad Saw;
- d. Menyempurnakan agama;
- e. Menikah termasuk sunnahnya para utusan Allah;
- f. Melahirkan anak yang dapat memintakan pertolongan Allah untuk Ayah dan ibu mereka saat masuk surga;

¹⁴Dewi Wulansari, *Hukum Adat Indonesia. Suatu Pengantar*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2010),h. 24.

¹⁵Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat (Kajian Fiqh Nikah Lengkap)*, (Rajawalipress, Jakarta, 2009), h. 18-19.

- g. Menjaga masyarakat dari keburukan, runtuhnya moral, perzinaan, dan lain sebagainya;
- h. Legalitas untuk melakukan hubungan intim, menciptakan tanggung jawab bagi suami dalam memimpin rumah tangga, member nafka dan membantu istri dirumah;
- i. Mempertemukan tali keluarga yang berbeda sehingga memperkokoh lingkaran keluarga;
- j. Saling mengenal dan menyayangi;
- k. Menjadikan ketenagan kecintaan dalam jiwa suami dan istri;
- l. Sebagai pilar untuk membangun rumah tangga islam yang sesuai dengan ajaran-Nya terkadang bagi orang yang tidak menghiraukan kalimat Allah SWT. Maka tujuan nikahnya akan menyimpang;
- m. Suatu tanda kebebasan Allah SWT. Kita melihat orang yang sudah menikah, awalnya mereka tidak saling mengenal satu sama lainnya, tetapi dengan melangsungkan tali pernikahan hubungan keduanya biasa saling mengenal dan sekaligus mengasihi;
- n. Memperbanyak keturunan umat Islam dan menyemarakkan bumi melalui proses pernikahan;
- o. Untuk mengikuti panggilan *Iffah* dan menjaga pandangan kepada hal-hal yang diharamkan.

Abd. Rahman Ghasaly dalam bukunya menuliskan bahwa antara rukun dan syarat perkawinan terdapat perbedaan didalam pengertiannya. Rukun, yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti membasuh muka untuk

wudu dan *takbiratul/ihram* untuk shalat atau adanya calon penganting laki-laki/perempuan dalam perkawinan.¹⁶

Syarat, yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam pekerjaan itu, seperti menutup aurat atau shalat atau menurut islam calon penganting laki-laki/perempuan itu harus beragama Islam.

1. Rukun Perkawinan

Jumhur ulama sepakat bahwa rukun perkawinan itu terdiri atas:

- a. Adanya calon suami dan istri yang akan melakukan perkawinan.
- b. Adanya wali dari pihak calon penganting perempuan.
- c. Adanya dua orang saksi.
- d. Sighat akad nikah, yaitu ijab Kabul yang diucapkan oleh wali atau wakilnya dari pihak perempuan, dan dijawab oleh calon penganting laki-laki.

Tentang jumlah rukun nikah ini, para ulama berbeda pendapat: Imam Malik mengatakan bahwa rukun nikah itu ada lima macam, yaitu:

- Wali dari pihak perempuan;
- Mahar (Maskawin);
- Calon pengantin laki-laki;
- Calon pengantin perempuan;
- Sighat akad nikah.

Imam Syafi'I berkata bahwa rukun nikah itu ada lima macam, yaitu:

- Calon pengantin laki-laki;
- Calon pengantin perempuan;

¹⁶Abd Hamid Hakim, *Mabadi Awaliyah* (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), Cet Ke I, Jus I, h.9; Rahman Ghasaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Prenada Media, 2003), h. 45-46.

- Wali;
- Dua orang saksi;
- Sighat akad nikah;

Menurut ulama Hanafiyah, rukun nikah itu hanya ijab dan qabul saja (yaitu akad yang dilakukan oleh pihak wali perempuan dan calon pengantin laki-laki). Sedangkan menurut golongan yang lain rukun nikah ini ada empat, yaitu:

- Sighat ijab dan qabul,
- Calon pengantin perempuan,
- Calon pengantin laki-laki,
- Wali dari pihak calon pengantin perempuan.

Pendapat yang mengatakan bahwa rukun nikah itu ada empat, karena calon pengantin laki-laki dan calon pengantin perempuan digabung menjadi satu rukun seperti terlihat di bawah ini.

1. Rukun perkawinan:

- Dua orang yang saling melakukan akad perkawinan, yakni mempelai laki-laki dan mempelai perempuan,
- Adanya wali,
- Adanya dua orang saksi,
- Dilakukan dengan sighat tertentu.

2. Syarat Sahnya Perkawinan

Syarat-syarat perkawinan merupakan dasar bagi sahnya perkawinan. Apabila syarat-syaratnya terpenuhi, maka perkawinan itu sah dan menimbulkan adanya segala hak dan kewajiban sebagai suami istri. Pada garis besarnya syarat-syarat sahnya perkawinan itu ada dua:

1. Calon mempelai perempuannya halal dikawini oleh laki-laki yang ingin menjadikannya istri. Jadi, perempuannya itu bukan merupakan orang yang haram dinikahi, baik karena haram untuk dinikah sementara maupun untuk selamanya.

2. Akad nikahnya dihadiri para saksi.

Secara rinci, masing-masing rukun diatas akan dijelaskan syaratsyaratnya sebagai berikut:

1. Syarat-syarat kedua mempelai

a. Syarat-syarat pengantin pria

Syariat Islam menentukan beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh calon suami berdasarkan ijthid para ulama, yaitu:

- 1) Calon suami beragama Islam;
- 2) Terang (jelas) bahwa calon suami itu betul laki-laki;
- 3) Orangnya diketahui dan tertentu;
- 4) Calon mempelai laki-laki itu jelas halal kawin dengan calon istri;
- 5) Calon mempelai laki-laki tahu/kenal pada calon istri serta tahu betul calon istrinya halal baginya;
- 6) Calon suami rela (tidak dipaksa) untuk melakukan perkawinan itu;
- 7) Tidak sedang melakukan ihram;
- 8) Tidak mempunyai istri yang haram dimadu dengan calon istri;
- 9) Tidak sedang mempunyai istri empat;

b. Syarat-syarat pengantin calon pengantin perempuan;

- 1) Beragama Islam atau ahli Kitab;
- 2) Terang bahwa ia wanita, bukan *khuntsa* (banci);

- 3) Wanita itu tentu orangnya;
- 4) Halal bagi calon suami;
- 5) Wanita itu tidak dalam ikatan perkawinan dan tidak masih dalam 'iddah;
- 6) Tidak dipaksa/ikhtiyar;
- 7) Tidak dalam keadaan ihram haji atau umrah;

c. Syarat-syarat Ijab Kabul;

- 1) Perkawinan wajib dilakukan dengan ijab dan Kabul dengan lisan;
- 2) Ijab dilakukan oleh pihak wali mempelai perempuan atau walinya, sedangkan Kabul dilakukan oleh mempelai laki-laki atau wakilnya;
- 3) Ijab dan Kabul dilakukan di dalam satu majelis, dan tidak boleh ada jarak yang lama antara ijab dan Kabul yang merusak kesatuan akad dan kelangsungan akad, dan masing-masing ijab dan Kabul dapat didengar dengan baik oleh kedua belah pihak orang tua dan dua orang saksi;
- 4) Lafazh yang digunakan untuk akad nikah adalah lafazh nikah atau tazwij, yang terjemahannya adalah kawin dan nikah.

d. Syarat-syarat wali

Wali hendaklah seorang laki-laki, muslim, baligh, berakal dan adil (tidak fasik).

e. Syarat-syarat saksi

- 1) Berakal, bukan orang gila;
- 2) Baligh, bukan anak-anak;
- 3) Merdeka, bukan budak;
- 4) Islam;
- 5) Kedua orang saksi itu mendengar.

C. Pengertian dan Dasar Hukum Mahar

1. mahar

Mahar secara etimologi artinya maskawin. Secara terminologi, mahar ialah pemberian yang wajib dari calon suami kepada calon istri sebagai ketulusan hati calon suaminya. Atau, suatu pemberian yang diwajibkan bagi calon suami kepada calon istrinya, baik dalam bentuk benda maupun jasa (memerdekakan, mengajar, dan lain sebagainya).¹⁷

Mahar itu dalam bahasa Arab disebut dengan delapan nama yaitu : mahar, shadaq, nihlash, faridhah, hiba', ujr, 'uqar, dan alaiq. Keseluruhan kata tersebut mengandung arti pemberian wajib sebagai imbalan dari sesuatu yang diterima.¹⁸

Sedangkan kompilasi hukum islam (KHI) dengan ringkas menjelaskan bahwa mahar merupakan pemberian yang wajib bagi seorang calon mempelai laki-laki kepada calon mempelai perempuan yang jumlah dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak.¹⁹

Imam Syafi'I mengatakan bahwa mahar adalah sesuatu yang wajib diberikan oleh seorang laki-laki kepada perempuan untuk dapat menguasai seluruh anggota badannya.²⁰

Secara garis besar, pengertian mahar dari berbagai penulis tidaklah berbeda. Mahar adalah pemberian wajib yang diberikan kepada calon mempelai wanita oleh calon mempelai laki-laki baik berupa barang maupun jasa ketika dilaksanakan akad nikah sebagai syarat sahnya suatu pernikahan.

¹⁷Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat (Kajian Fiqh Nikah Lengkap)*, (Rajawalipress, Jakarta, 2009), h.36-37.

¹⁸Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam*, (Kencana Perdana Media Group, Jakarta, 2009), h. 84-85.

¹⁹Lihat Pasal 30 *Kompilasi Hukum Islam*.

²⁰Abd. Rachmat Ghasaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Prenada Media, 2003), h. 85.

Dari definisi mahar tersebut diatas jelasnya bahwa hukum *taklifi* dari mahar itu adalah wajib, dengan arti laki-laki yang mengawini seorang perempuan wajib menyerahkan mahar kepada istrinya itu dan berdosa suami yang tidak menyerahkan mahar kepada istrinya.²¹

Dasar wajibnya menyerahkan mahar itu ditetapkan dalam Al-Qur'an dan dalam Hadist Nabi. Dalil dalam ayat Al-Qur'an yaitu sebagai berikut :

a. Firman Allah :

“Berikanlah maskawin kepada perempuan yang kamu kawini sebagai pemberian yang wajib”. (Q.S an-Nisa' : 4).

b. “.... Maka istri-istri yang telah kamu campuri, berikanlah kepada mereka mahar yang sempurna sebagai suatu kewajiban, dan tidak ada halangannya kamu perlakukan mahar itu sesuai kerelaan (suami-istri), setelah ditentukan wujud kadarnya...” (Q.S an-Nisa' : 25)

Dengan demikian mahar yang menjadikan hak istri itu dapat diartikan sebagai tanda bahwa suami sanggup untuk memikul kawajiban-kewajiban sebagai suami dalam hidup perkawinannya selanjutnya. Jadi jangan diartikan bahwa pemberian mahar itu sebagai pembelian atau upah bagi istri yang telah menyerahkan dirinya kepada suami.

Islam sangat memerhatikan dan menghargai kedudukan seorang perempuan dengan member hak kepadanya diantaranya adalah hak untuk menerima mahar.

Mahar hanya diberikan oleh calon suami kepada calon istri, bukan kepada perempuan lainnya atau siapa pun walaupun sangat dekat dengannya. Orang lain

²¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 85.

tidak boleh menjamah apalagi menggunakannya, meskipun oleh suaminya sendiri, kecuali dengan ridha dan kerelaan istri.

2. Syarat-Syarat, Macam-Macam, Bentuk, dan Jumlah Mahar

1. Syarat-Syarat Mahar

Mahar yang diberikan kepada calon istri harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Harta berharga. Tidak sah mahar dengan yang tidak berharga walaupun tidak ada ketentuan banyak atau sedikitnya mahar, mahar sedikit, tapi bernilai tetap sah disebut mahar.
- b. Barangnya suci dan bisa diambil manfaatnya. Tidak sah mahar dengan memberikan khamar, babi, atau darah, karena semua itu haram dan tidak berharga.
- c. Barangnya bukan barang ghasab. Ghasab artinya mengambil barang milik orang lain tanpa seizinnya namun tidak bermaksud untuk memilikinya karena berniat untuk mengembalikannya kelak. Memberikan mahar dengan mahar barang hasil ghasab tidak sah, tetapi akadnya tetap sah.
- d. Bukan barang yang tidak jelas keadaannya. Tidak sah mahar dengan memberikan barang yang tidak jelas keadaannya, atau tidak disebutkan jenisnya.

2. Macam-Macam Mahar

Adapun macamnya mahar (maskawin) dapat dibagi menjadi dua yaitu :²²

- a. Mahar Musamma
- b. Mahar Mitsil

²²Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat, Kajian Fiqh Nikah Lengkap* (Rajawali Press: Prenada Media, 2014).h. 45-47

- a. Mahar Musamma, yaitu mahar yang sudah disebut atau dijanjikan kadar besarnya ketika akad nikah. Atau, mahar yang dinyatakan kadarnya pada waktu akad nikah.²³

Ulama fiqh sepakat bahwa, dalam pelaksanaannya, mahar musamma harus diberikan secara penuh apabila :

1. Telah bercampur (bersenggaman).
2. Salah satu dari suami-istri meninggal.

Mahar musamma juga wajib dibayar seluruhnya apabila suami telah bercampur dengan istri, dan ternyata nikahnya rusak dengan sebab tertentu, seperti ternyata istrinya mahram sendiri, atau dikira perawan ternyata janda, atau hamil dari bekas suami lama. Akan tetapi, kalau istri diceraikan sebelum bercampur, hanya wajib dibayar setengahnya.

- a) Mahar Mitsli (sepadan) yaitu mahar yang tidak disebut besar kadarnya pada saat sebelum ataupun ketika terjadi pernikahan. Atau mahar yang diukur (sepadan) dengan mahar yang pernah diterima oleh keluarga terdekat, agak jauh dari tetangga sekitarnya, dengan memerhatikan status sosial, kecantikan, dan sebagainya.²⁴

Bila terjadi demikian (mahar itu disebut besar kadarnya pada saat sebelum atau ketika terjadi pernikahan), maka mahar itu mengikuti maharnya saudara perempuan pengantin wanita (bibi, bude), uwa perempuan (jawa tengah/jawa timur), ibu uwa (jawa benten), anak, perempuan, bibi/bude). Apabila tidak ada, mahar mitsli itu beralih dengan ukuran wanita lain yang sederajat dengan dia.

²³M. Abdul Mujid Dkk, *Kamus Istilah Fiqh*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1995), h. 185.

²⁴M. Abdul Mujid dkk, *Kamus Istilah Fiqh*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1995). h. 185; H. Abd. Rahman Ghasali, Op. Cit., h. 93.

Mahar mitsli juga terjadi dalam keadaan sebagai berikut:

- 1) Apabila tidak disebutkan kadar mahar dan besarnya ketika berlangsung akad nikah, kemudian suami telah bercampur dengan istri, atau meninggal sebelum bercampur.
- 2) Jika mahar musamma belum dibayar sedangkan suami telah bercampur dengan istri dan ternyata nikahnya tidak sah.

Nikah yang tidak disebutkan dan tidak ditetapkan maharnya disebut nikah tafwid.

3. Bentuk Mahar (Maskawin)

Pada prinsipnya maskawin harus bermanfaat dan bukanlah sesuatu yang haram dipakai, dimiliki, atau dimakan. Ibnu Rusyd mengatakan bahwa mahar harus berupa sesuatu dan dapat ditukar dan ini terkesan harus berbentuk benda sebab selain terbentuk benda tidak dapat ditukar tampaknya tidak dibolehkan. Namun, menurut rahmat Hakim, sesuatu yang bermanfaat tidak dinilai dengan ukuran umum, tetapi bersifat subjektif sehingga tidak selalu dikaitkan dengan benda. Dalam hal ini, calon istri mempunyai hak untuk menilai dan memilihnya, ini sangat kondisional. Artinya, dia mengetahui siapa dia dan siapa calon suaminya.²⁵

4. Jumlah Mahar

Agama tidak menetapkan jumlah minimum dan begitu pula jumlah maksimum dari maskawin. Hal ini disebabkan oleh perbedaan tingkatan kemampuan manusia dalam memberinya. Orang yang kaya mempunyai kemampuan untuk member maskawin yang lebih besar jumlahnya kepada calon istrinya. Sebaliknya, orang yang miskin ada yang hampir tidak mampu memberinya.²⁶ Oleh karena itu,

²⁵Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, (bandung: Pustaka Setia, 2000). h. 75.

²⁶Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006). h. 91

pemberian mahar diserahkan menurut kemampuan yang bersangkutan disertai kerelaan dan persetujuan masing-masing pihak yang akan menikah untuk menetapkan jumlahnya. Mukhtar Kamal menyebutkan, “janganlah hendaknya ketidaksanggupan membayar maskawin karena besar jumlahnya menjadi penghalang bagi berlangsungnya suatu perkawinan”.

3. Pelaksanaan Pembayaran Mahar

Pembayaran mahar sebaiknya dilakukan dengan kontan, dalam hal itu apabila calon mempelai wanita menyetujui pembayaran mahar boleh ditangguhkan, baik untuk seluruhnya atau untuk sebagian maka yang belum dibayar kontang pembayarannya menjadi hutang calon mempelai pria. Hutang mahar seperti itu wajib dilunasi dengan cara dan waktu sesuai dengan perjanjian. Jika calon mempelai perempuan rela menghapuskan hutang itu dan tidak menuntut pembayaran sebesar apa yang telah dihapuskan itu, maka lunaslah dia.²⁷

Dalam hal penundaan pembayaran mahar (dihutang) terdapat dua perbedaan perbedaan pendapat dikalangan ahli fikih. Segolongan ahli fikih berpendapat bahwa mahar itu tidak boleh diberikan dengan cara dihutang keseluruhan. Segolongan lainnya mengatakan bahwa mahar boleh ditunda pembayarannya, tetapi mengajurkan agar membayar sebagian mahar dimuka manakala akan mengauli istri. Dan diantara fuqaha yang membolehkan penundaan mahar (diangsur) ada yang membolehkan hanya untuk tenggan waktu terbatas yang telah ditetapkannya.²⁸

Akan tetapi memberikan mahar pada saat dilangsungkan akad lebih baik, dan secara hukum dipandang sunnah memberikan mahar sebagian terlebih dahulu.

²⁷Djama Nur, *Fiqh Munakahat, Dina Ulama Semarang* (DIMAS), (Bengkulu, 1993), h. 87.

²⁸Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat, Kajian Fiqh Nikah Lengkap* (RajawaliPress: Prenada Media, 2014). h. 44.

Wajib memberikan maskawin karena 3 perkara, yaitu: ²⁹

1. Menentukan seorang laki-laki akan maskawin akan dirinya (sebelum dukhul dan atas kerelaan calon istrinya);
2. Atau atas penentuan hakim akan maskawin itu;
3. Atau karena mendukhul si laki-laki pada istrinya, maka wajib maskawin yang lumrah (yang berlaku bagi umumnya wanita yang senilai dengan dia). Tidak ada bagi sedikitnya maskawin dan banyaknya batas-batas (yang ditentukan oleh syara' melainkan atas adat).

Dengan demikian seorang perempuan telah menjadi istrinya apabila akad-nikah telah dilaksanakan, sehingga hak istri atas mahar adalah sejak akad nikah selesai dilakukan.

Si istri berhak atas mahar seluruhnya apabila benar-benar telah terjadi persetubuhan antara mereka. Dan apabila antara mereka terjadi perceraian sebelum bersetubuh, maka hak istri atas mahar hanya separuhnya saja. Hal ini dapat kita lihat pada Al-Qur'an Surat an-Nisa' ayat 20-21.

Apabila terjadi kematian salah satu pihak, suami atau istri sebelum bercampur, mahar itupun tetap harus dibayar. Seandainya si suami yang meninggal maka pembayaran mahar itu diambil dan harta peninggalannya sebagai penulasan hutang. Apabila si istri yang meninggal maka hanya mahar harus dipenuhi oleh suami dan merupakan dari harta peninggalan si istri.³⁰

D. Sejarah *Doi' Nai'* dalam Perkawinan Adat *Ammatoa*

Orang kajang adalah penduduk asli dari daerah sekitar kajang dan wilayah sekitarnya. Bahasa yang digunakan oleh orang kajang dinamakan bahasa Konjo. Adat

²⁹ Moch. Anwar, *Fiqh Islam*, PT. Alma'arif, (Bandung, 1983), h. 169-170.

³⁰ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam Islam*, (Yogyakarta, 1892), h.58.

pemberian *Doi' Nai'* diadopsi dari adat kajang perkawinan suku kajang asli. *Doi' Nai'* bermakna pemberian uang dari pihak keluarga calon mempelai laki-laki kepada keluarga calon mempelai wanita dengan tujuan sebagai penghormatan.³¹

penghormatan yang dimaksud disini adalah rasa penghargaan yang diberikan oleh pihak calon mempelai pria kepada wanita yang ingin dinikahinya dengan memberikan pesta yang megah untuk pernikahannya melalui *doi' nai'* tersebut).

Pemberian *Doi' Nai'* yang dilakukan pada masyarakat Kajang tidak jauh berbeda dengan *doi' nai'* yang ada pada masyarakat kajang asli yaitu sama-sama statusnya sebagai pemberian wajib ketika akan melangsungkan perkawinan. Sehingga kemungkinan besar sejarah adanya pemberian *doi' nai'* pada masyarakat kajang dibawah oleh suku kajang asli yang bermigrasi kekajang.

Fungsi *Doi' Nai'* yang diberikan secara ekonomis membawa pergeseran kekayaan karena *doi' nai'* yang diberikan mempunyai nilai tinggi. Secara sosial wanita mempunyai kedudukan yang tinggi dan dihormati. Secara keseluruhan *doi' nai'* merupakan hadiah yang diberikan calon mempelai laki-laki kepada calon istrinya untu memenuhi keperluan perkawinan.

E. Pengertian Sompas dan *Doi' Nai'*, serta Perbedaannya dengan Mahar

Budaya perkawinan pada tiap-tiap daerah tentu memiliki perbedaan dan memiliki keunikan yang sangat menarik untuk dibahas. Karena yang terjadi dalam perkawinan bukan hanya tentang menyatukan dua orang yang saling mencintai, tetapi lebih dari itu ada nilai-nilai yang patut dipertimbangkan dalam perkawinan seperti status sosial, ekonomi, serta nilai budaya.

³¹Puspita, “Tradisi Uang Panaik dalam Budaya Bugis Makassar,” dalam <http://akulebihdariyangkautahu>, blokspot/ (16 Januari 2017).

Inti dari perkawinan *Ammatoa* adalah kaidah tentang pembayaran resmi sejumlah mahar oleh mempelai laki-laki kepada orang tua pengantin perempuan sebagai lambang status sosial pihak pengantin wanita. Berhubung karena perkawinan pertama selalu diliputi dengan manusia kesetaraan status sosial, nilai mahar yang diserahkan juga menjadi suatu indikator untuk melihat status sosial pengantin wanita.

Di Sulawesi Selatan, dalam adat perkawinannya ada dua hal yang merupakan bagian dari mahar atau maskawin yang sepertinya telah menjadi khas dalam perkawinan yang akan diadakan yaitu *doi' nai'* atau oleh masyarakat Desa Tanah Toa disebut *sompa* atau *sunrang* dan *doi' nai'* (kajang), atau *uang panaik/doi balanja* (Makassar).

Seperti yang telah dijelaskan di atas, Mahar adalah pemberian wajib yang diberikan kepada calon mempelai perempuan oleh calon mempelai laki-laki baik berupa barang maupun jasa ketika dilangsungkan akad nikah sebagai syarat sah nya suatu pernikahan.

Sompa secara harafiah berarti “persembahan” yang sekarang di simbolkan dengan sejumlah *doi' reala* (yakni *rial*, mata uang Portugis yang sebelumnya berlaku, antara lain di Malaka). *Reala* di tetapkan sesuai status perempuan dan akan menjadi hak miliknya.

Sompa dinyatakan dalam sejumlah nilai perlambang tukar tertentu yang tidak berlaku lagi secara nominal dan tidak mempunyai nilai yang dapat dibanding dengan nilai uang yang sekarang. Besaran ini sudah ditentukan jumlahnya secara adat, berdasarkan derajat tertentu, sesuai garis keturunan si calon mempelai perempuan. Di sini penting diingat bahwa calon mempelai perempuan tidak pernah menerima mahar yang lebih rendah dari jumlah yang dulu diterima ibunya. Bagi kebanyakan orang, hal

ini tidak begitu dipermasalahkan, karena mereka biasanya menerima mahar status orang kebanyakan yang sama nilainya. Namun demikian, bagi kalangan bangsawan dan orang terpandang, mereka sangat memerhatikan besaran jumlah uang serahan ini, karena menjadi simbol perpanjangan status sosial mereka. Oleh sebab itu, mahar selalu diumumkan dan dibayarkan lunas dalam upacara akad nikah.

Di jaman lampau, *sompa* atau *sunrang* menurut derajat sosial si gadis yang dipinang itu, diperhitungkan dengan amat teliti, karena sangat menyangkut tentang status sosial keluarga. Garis-garis besar perhitungan *sompa/sunrang* juga diikuti sampai sekarang, walaupun tidak seteliti di masa dahulu. Adapun tingkat *sompa/sunrang* agak berbeda-beda antara satu daerah dengan daerah lainnya.

Sedangkan *doi' nai'* atau *uang panaik* adalah “uang antaran” pihak laki-laki kepada keluarga pihak perempuan untuk digunakan melaksanakan pesta perkawinan. Besarnya *doi' nai'* ditentukan oleh keluarga perempuan.

Secara sepintas, ketiga istilah tersebut di atas memang memiliki pengertian yang hampir sama, yaitu ketiganya sama-sama merupakan kewajiban. Namun, jika dilihat dari sejarah yang melatarbelakanginya, pengertian ketiga istilah tersebut jelas berbeda.

Pemberian Mahar diserahkan sesuai dengan kemampuan dan kerelaan yang bersangkutan yang telah ditetapkan atas persetujuan kedua pihak, karena pemberian itu harus dilakukan dengan ikhlas dan tanpa paksaan dari pihak mana pun. Sedangkan *sompa* dan *doi' nai'* sebetulnya berbeda dengan Mahar dalam ajaran Islam. *Sompa* itu bertingkat-tingkat, sesuai dengan derajat sosial dari gadis yang dipinang. *Sompa* itu biasanya dihitung dengan nilai reala (real), dahulu dihitung dengan nilai nominal F. 2,- (dua gulden zaman Hindia Belanda). Beberapa kejadian terakhir, 1 real diberi

nominal Rp.100,- sampai Rp.150,-. Maskawin yang diberi nilai nominal menurut harga real dapat saja terdiri atas sebidang tanah, sawah, kebun, atau benda-benda pusaka lainnya.

Lain halnya dengan *doi' nai'* yaitu uang yang diberikan kepada keluarga pihak perempuan untuk melaksanakan pesta perkawinan.

Dari penjelasan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa Mahar atau maskawin adalah kewajiban dalam tradisi Islam, sedangkan *sompa/sunrang* dan *doi' nai' /uang panaik* adalah kewajiban menurut adat kepercayaan masyarakat setempat. Ketiga istilah tersebut tidak hanya berbeda dari segi pengertian saja, akan tetapi berbeda pula dalam hal jumlah, kegunaan dan pemegang ketiganya. Jumlah uang mahar biasanya hanya berkisar Rp.500.00 sampai jutaan. Mahar untuk saat ini biasanya lebih mengutamakan aset seperti emas dan tanah.

Sedangkan untuk *doi' nai'* jumlahnya lebih tinggi daripada jumlah mahar. Saat ini biasanya jumlah *doi' nai'* berkisar antara 45 juta hingga ratusan juta tergantung kesepakatan dari kedua belah pihak pada saat negosiasi. Tolok ukur tingginya *doi' nai'* disebabkan beberapa faktor, seperti:

- 1) Status sosial keluarga perempuan apa ia dari keluarga bangsawan atau tidak.
Namun, untuk sekarang faktor ini sudah tidak terlalu diperhatikan lagi.
- 2) Status ekonomi keluarga pihak perempuan, semakin kaya calon mempelai semakin tinggi pula *doi' nai'* yang dipatok.
- 3) Jenjang pendidikan, besar kecilnya *doi' nai'* sangat terpengaruh jenjang pendidikan calon istri, apabila pendidikannya hanya tingkat Sekolah Dasar maka semakin kecil pula *doi' nai'* yang dipatok begitu pula sebaliknya jika calon istri lulusan sarjana maka semakin tinggi pula jumlah nominal *Doi' Nai'*.

4) Kondisi fisik calon istri. Yang dimaksud ialah paras yang cantik, tinggi badan, dan kulit putih. Semua faktor ini tetap saling berhubungan, bisa saja calon istri tidak memiliki paras yang cantik tapi kondisi ekonomi yang kaya, tetap saja *doi' nai'* akan tetap tinggi.

Mahar dan sompa dipegang oleh istri dan menjadi hak mutlak bagi dirinya sendiri. *Doi' nai'* dipegang oleh orang tua istri untuk membiayai semua kebutuhan jalannya resepsi pernikahan. Tetapi, sebagian masyarakat Kajang Desa Tanah Toa memandang bahwa nilai kewajiban dalam adat lebih tinggi daripada nilai kewajiban dalam syariat Islam. Padahal, seharusnya mereka lebih mengedepankan nilai kewajiban syariat Islam daripada nilai kewajiban menurut adat.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Lokasi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian lapangan (*field research*) yang sumber datanya terutama diambil dari obyek penelitian (masyarakat atau komunitas sosial) secara langsung di daerah penelitian.³²

Penelitian ini didasari dengan maksud untuk menggambarkan secara kualitatif mengenai Tinjauan Hukum Islam Tentang *Doi' Nai'* Dalam Perkawinan Adat *Ammatoa* Desa Tanah Towa Kec. Kajang Kab. Bulukumba. Hal tersebut yang menjadi fokus dan dikaji serta dianalisis secara kualitatif dalam penelitian ini.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian Ini Dilaksanakan Di *Ammatoa* Desa Tanah Toa Kec. Kajang Kab. Bulukumba. Karena penulis ingin melihat sejauh mana Tinjauan Hukum Islam Tentang *Doi' Nai* Dalam Perkawinan Adat *Ammatoa* Desa Tanah Toa Kec. Kajang Kab. Bulukumba.

B. Pendekatan Penelitian

pendekatan merupakan cara yang dilakukan peneliti untuk menguasai dan mengembangkan ilmu pengetahuan yang paling tinggi validitasnya dan ketepatannya sebagai acuan dalam penelitian. Pendekatan juga dapat mengarahkan penelitian ini yang akan kita kaji sehingga penelitian tersebut menjadi lebih dalam.

³²Yayan Sopyan, *Metode Penelitian hukum*, (Jakarta: Buku Ajar, 2009), h. 28.

C. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini dapat dibedakan menjadi dua yaitu:

1. Data Primer

Sumber data primer yaitu data yang langsung diperoleh dari subyek penelitian (responden) yaitu masyarakat suku kajang desa tanah towa kec. Kajang kab. Bulukumba yang masih menjalankan adat tersebut yaitu para tokoh adat atau orang yang tuakan.

2. Data Sekunder

Sumber data sekunder yaitu data yang dikumpulkan untuk melengkapi data primer yang diperoleh dari dokumentasi atau studi kepustakaan yang terkait dalam permasalahan yang diteliti. Dalam penelitian ini data yang digunakan penulis adalah data yang dikumpulkan oleh orang lain, pada waktu penelitian dimulai data telah tersedia.³³ Selain itu data yang memberikan bahan tidak langsung atau data yang didapatkan selain data primer. Data ini dikumpulkan melalui studi pustaka yang berkaitan diantaranya buku-buku *fiqh*, sejarah, dan data yang terkumpul yang mempunyai hubungan dengan tema ini.

D. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian untuk mendapat data yaitu:

1. Penelitian Pustaka (*liberary research*)

³³Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), h. 37.

Yaitu penelitian yang menghimpun data atau informasi dengan membaca dan mencatat sejumlah literatur yang diperoleh dari perpustakaan atau pada tempat lain pada sebuah daftar bahan pustaka.

2. Penelitian Lapangan

Dilihat dari cara mendapatkan informasi, penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian untuk memperjelas kesesuaian antara konsep atau teori dengan praktek yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

Data yang dikumpulkan harus cukup valid untuk digunakan. Validitas data dapat ditingkatkan kualitas dari pengambil datanya sendiri cukup valid. Untuk mempermudah dalam menganalisis data, maka pengumpulan data yang digunakan adalah:

a. Pengamatan (Observasi)

Observasi atau pengamatan merupakan suatu teknik atau cara mengumpulkan data dengan jalan mengadakan pengamatan terhadap kegiatan yang sedang berlangsung.³⁴

b. Wawancara (*interview*)

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan/data untuk tujuan penelitian dengan cara Tanya jawab, sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan dengan menggunakan alat yang dinamakan panduan wawancara.³⁵

³⁴Nana Syaodin Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Cet, II; Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006), h. 220.

³⁵Syofian Sireger, *Statistika Deskriptif Untuk Penelitian*, (Cet, IV; Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014), h. 130.

c. Dokumen

Dokumentasi merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan menghimpung dan menganalisis dokumen-dokumen, baik tertulis, gambar maupun elektronik.³⁶

E. Instrumen penelitian

Penggumpulan data pada prinsipnya merupakan suatu aktivitas yang bersifat operasional agar tindakannya sesuai dengan pengertian penelitian yang sebenarnya. Data merupakan perwujudan dari beberapa informasi yang sengaja dikaji dan dikumpulkan guna mendeskripsikan suatu peristiwa atau kegiatan lainnya. Oleh karena itu, dalam penggumpulan data dibutuhkan beberapa instrument sebagai alat untuk mendapatkan data yang cukup valid dan akurat dalam suatu penelitian.

Instrument penelitian merupakan salah satu unsur yang sangat penting dalam pengumpulan data. Dalam rencana penelitian ini, yang akan menjadi instrument adalah peneliti sendiri karena jenis penelitian ini adalah kualitatif. Setelah masalah dilapangan terlihat jelas, maka instrument didukung dengan pedoman wawancara, alat-alat dokumentasi, serta alat tulis.

F. Teknik Pengolahan Dan Analisis Data

a. Teknik Pengolahan Data

Teknik pengolahan data dilakukan dengan beberapa cara yaitu metode penelitian wawancara yaitu proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara Tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan responden atau orang yang diwawancarai dengan atau tanpa menggunakan pedoman

³⁶Nana Syaodin Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Cet, II; Bandung: PT Remaja Rosdakarya , 2006), h. 221.

wawancara. Selain itu, penulis juga melakukan penelaan terhadap artike-artikel yang dianggap mempunyai kaitan atau hubungan yang dapat membantu penulis.

b. Analisis Data

Dalam penelitian ini penulis menganalisis data tersebut dengan menggunakan metode analisis deskriptif yaitu suatu analisis yang bertujuan untuk memberi deskripsi mengenai keadaan atau fenomena secara mendalam dari semua aspek. Metode analisis ini bertujuan mengetahui deskripsi perihal pemberian *Doi' Nai'* dalam perkawinan adat Amma Towa Masyarakat yang selanjutnya dianalisis dengan menggunakan hukum Islam. Kemudian data tersebut diuji dengan ketentuan yang ada dan yang sesuai dengan hukum islam. Hasil penelitian dan pengujian tersebut disimpulkan dalam bentuk deskripsi sebagai hasil pemecahan permasalahan yang ada sesuai dengan rumusan masalah yang telah dibatasi dalam penelitian ini.

G. Pengujian Keabsahan Data

1. Perpanjangan Pengamatan

Perpanjangan pengamatan berarti peneliti kembali ke lapangan, melakukan pengamatan, wawancara lagi dengan sumber data yang pernah ditemui maupun yang baru. Dengan perpanjangan pengamatan ini berarti hubungan peneliti dengan narasumber akan semakin terbentuk *Repport*, semakin akrab (tidak ada jarak lagi), semakin terbuka, saling mempercayai sehingga tidak ada informasi yang disembunyikan lagi.

2. Meningkatkan Ketekunan

Meningkatkan ketekunan ini berarti melakukan pengamatan secara lebih cermat dan berkesinambungan. Dengan cara tersebut maka kepastian data dan urutan peristiwa akan dapat direkam secara pasti dan sistematis.

3. Trigulasi

Menurut William Wiersma trigulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu.³⁷

³⁷Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, h. 369-372

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Profil Lokasi Penelitian

1. Kondisi Geografis Desa Tanah Towa

Kawasan adat *Ammatoa* bertempat di Desa Tanah Towa, Kecamatan kajang, Kabupaten Bulukumba Provinsi Sulawesi Selatan yang berada sekitar 200 km dari Kota Makassar. Menurut tempat mukimnya, suku kajang terbagi dalam dua kelompok yaitu suku kajang luar (*Ipantarang Embayya*) yang meliputi seluruh Desa yang berada di Kecamatan Kajang kemudian tidak termasuk wilayah *Ilalang Embayya* dan suku Kajang dalam (*Ilalang Embayya*) yang meliputi dusun Benteng, Sobbu, Bongkina, Pangi, Tombolo, Balambina dan Luraya yang berada dalam wilayah Desa Tanah Towa. Dalam kesehariannya masyarakat ini menggunakan bahasa Makassar berdialek Konjo. Suku Kajang dalam (*Ilalang Embayya*) di Desa Tanah Towa meliputi 7 dusun yaitu dusun Benteng, Sobbu, Lurayya, Bingkina, Balambina, Tombolo dan Pangi. Pusat kegiatan komunitas Suku Kajang *Ammatoa* berada di suku Kajang dalam tepatnya di dusun Benteng yang ditandai dengan kehadiran rumah *Ammatoa* dan rumah warga kawasan adat dengan bentuk rumah panggung yang tiangnya berjumlah 16 dan ditanam di bawah tanah dan dapurnya terletak disamping pintu masuk rumah. Rumahnya di bangun dari sumber daya alam seperti pepohonan dan beratapkan daun rumbia yang disusun sendiri oleh masyarakat suku Kajang *Ammatoa*.

Desa Tanah Towa Kecamatan Kajang Kabupaten Dati II Bulukumba, Terletak dibagian Utara Kecamatan kajang, berbatasan dengan wilayah Kabupaten Dati II sinjai. Luas wilayah Desa Tanah Towa 1.820 ha, terdiri atas Sembilan dusun, yaitu :

1) Dusun Balagana, 2) Dusun Jannaya, 3) Dusun Sobbu, 4) Dusun Lurayya, 5) Dusun Balambina, 6) Dusun Bongkina, 7) Dusun Benteng, 8) Dusun Tombolo dan 9) Dusun Pangi. Desa ini berbatasan dengan empat Desa yang merupakan pemekaran dari Desa Tanah Toa sendiri pada tahun 1995 yaitu: Sebelah Utara perbatasan dengan Desa Batunilamung, Sebelah Selatan berbatasan Dengan Desa Bonto Baji, Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Pattiroang dan sebelah Timur berbatasan dengan Desa Malleleng.

Dari kesembilan dusun yang ada di Desa Tanah Towa tersebut tujuh diantaranya berada dalam kawasan adat, dua yang lainnya berada diluar yaitu Dusun Balagana dan Dusun Jannayya. Luas wilayah yang masuk dalam kawasan ini adalah 998 ha, atau lebih dari separuh (55%) wilayah Desa Tanah Towa.

Kawasan adat Kajang di batasi secara alamiah, dengan empat sungai, yaitu: 1) Sungai Tuli di bagian Utara, 2) Sungai Limba dibagian Timur, 3) Sungai Sangkala dibagian Selatan, 4) Sungai Doro dibagian Barat.

Batasan alamiah tersebut oleh mereka disebut *Emba* (pagar) atau *Rambang* (kandang). Kawasan yang ada dalam lingkup batas alamiah itu kemudian disebut *Ilalang Embayya* (dalam pagar) dan daerah diluarnya disebut *Ipantarang Embayya* (di luar pagar). Dari istilah rambang kemudian dikonsepsikan kawasan dalam adat sebagai *Rambang Seppang* (kandang sempit), sementara kawasan luar dikonsepsikan sebagai rambang luara (kandang luas). *Rambang Seppanna Ammatoa* ini juga menjadi batas sejauh mana seorang *Ammatoa* boleh bepergian.

Tiap-tiap tempat yang menjadi Daerah Tanah Towa dalam keyakinan masyarakat adat bukan hanya soal geografis, tapi juga berkaitan dengan persoalan keyakinan spiritual dan keterkaitan mereka secara batin. Nama-nama seperti Doro,

Sangkala, Tuli dalam kawasan adat dan Dalonjo, Damangga, Dakodo, Dangampa, dan Tumutung Ri Sobbu (di luar kawasan adat) adalah nama-nama yang diyakini menjadi penjaga negeri yang memiliki hubungan batin dengan komunitas adat. Itulah sebabnya mengapa tanah atau daerah komunitas mereka menjadi begitu penting.³⁸

Demikian halnya dengan istilah *Ilalang Embayya* dan *Ipantarang Embayya* tidak sekedar sebagai batas wilayah tetapi lebih dari itu istilah ini juga menunjukkan batas-batas identitas antara komunitas dalam kawasan adat dengan luar kawasan adat. Perbedaan identitas itu misalnya ditunjukkan dengan simbol *Ilalang Embayya Tana Tu Kamas-Mase* (dalam lokasi adat sebagai tempat orang-orang yang bersahaja). Sedangkan *Ipantaran Embayya* sebagai *Tana Kuasaiyya* (diluar kawasan sebagai tempat orang-orang yang kuasa).

Jarak tempuh dari kota kecamatan sekitar 20 km, dari ibu kota kabupaten 50 km, dan dari provinsi 200 km. perjalanan dari ibu kota kecamatan ketempat ini adalah setengah jam, sedangkan dari ibu kota kabupaten satu jam setengah, dan dari ibu kota provinsi sendiri dapat ditempuh dengan waktu 3 sampai 5 jam. Di Desa Tanah Towa Khususnya diluar kawasan kendaraan lancar, bahkan sekarang sudah ada ojek. Untuk didalam kawasan berlaku aturan tersendiri mengenai transportasi seperti mobil, motor maupun sepeda tidak boleh masuk kedalam. Kendaraan yang dapat digunakan dalam kawasan hanya kuda sebagai kendaraan tradisional yang diterima masyarakat adat tersebut.

Sementara itu, dilihat dari relevasinya, tinggi dari permukaan laut Desa Tanah Towa bervariasi antara 75 m sampai 155 m. tertinggi adalah Dusun Balagana dan

³⁸Muhammad Abbas (36 Tahun), *Sekretaris Desa Tanah Towa*, wawancara, Tanah Towa 06 Mei 2017.

terendah adalah Dusun Tombolo. Curah hujan dikawasan ini mencapai 2000-2500 pertahun.

Komunitas adat kajang membentuk perkampungan tersendiri dengan jumlah unit keluarga 1250 kepala keluarga dan rumah sebanyak 1173 buah. Akan tetapi berbeda dengan pola perkampungan masyarakat luar dimana rumah diatur berderet sebelah menyebelah sepanjang jalan dan mencirikan adanya corak pelapisan sosial, pola perkampungan dalam kawasan Adat *Ammatoa* biasanya berkelompok (kluster) dan bentuknya seragam.

2. Kondisi Masyarakat di Kawasan Adat *Ammatoa* Desa Tanah Towa

Masyarakat adat *Ammatoa* Kajang merupakan sebuah komunitas masyarakat etnis di Sulawesi Selatan yang terdapat didaerah kabupaten Bulukumba, Kecamatan Kajang, Desa Tanah Towa, dalam kehidupan masyarakat Desa Tanah Towa masih sangat memegang kuat tradisi dan pola hidup yang senangtiasa bersentuhan langsung dengan alam. Bahkan uniknya lagi, komunitas masyarakat ini belum bisa menerima teknologi, dikarenakan bagi mereka teknologi yang ada saat ini dapat merusak adat istiadat dan lingkungan.

Alasan-alasan masyarakat menolak teknologi, dalam wilayah komunitas masyarakat ini, ialah ketidak sesuaian antara hukum adat dengan teknologi selain daripada itu teknologi juga dapat merusak kenyamanan dan keamanan masyarakat, seperti halnya di kota-kota besar yang pada umumnya tempat berpusatnya teknologi yang canggih seperti kendaraan roda dua dan kendaraan roda empat yang mengakibatkan folusi, listrik yang kadangkala juga urjen mengakibatkan kebakaran, sehingga masyarakat mengharamkan teknologi dalam kesehariannya. Masyarakat *Ammatoa* sangat patuh dan menjunjung tinggi adat istiadat sehingga simbolis dari

keunikan adat tersebut selamanya dia lekatkan dalam jiwa dan kepribadiannya dan mereka meyakini adat itu merupakan hal-hal yang ditanda, sementara yang ditanda itu membutuhkan penanda agar yang ditanda dapat dikenali. Yang dimaksud dengan yang ditanda dan penanda disini ialah substansinya adat namun yang dimaksud yang dimaksud dengan yang ditanda ialah ritual-ritual yang disakralkan oleh masyarakat, logikanya ketika adat kita ingin dikenali oleh keturunannya, setidaknya masyarakat membiasakan hal-hal yang seharusnya dibiasakan, seperti adat istiadat yang diterapkan dan dijadikan hukum oleh masyarakat adat kawasan *Ammatoa*. Jika orang asing atau orang luar tersebut yang ingin berkunjung kedalam kawasan mereka harus mematuhi aturan adat yang berlaku disana dan tentunya juga harus menggunakan pakaian hitam. Sebagai penanda adatnya masyarakat kawasan *Ammatoa*.

Dan setiap orang yang berkunjung bukan seharusnya hanya sekedar menyerupai dalam artia harus berpakaian hitam agar ada kemiripan dengan cirri khas orang tanah towa melaingkan memahami arti dari perpaduan dua warna (Hitam Putih).karena warna hitam putih bagi masyarakat Tanah Towa merupakan warna yang bermakna sehingga warna itulah yang dijadikan cirri khas kami di kawasan adat *Ammatoa*.

Bukan hanya itu, ada beberapa perbedaan fundamental yang menaturalkan khas kawasan *Ammatoa* dengan yang lain seperti rumah masyarakat adat dengan non masyarakat adat (rumah diluar kawasan *ammatoa*) lainnya adalah dinding dan lantai rumah dikawasan adat *Ammatoa* terbuat dari pecahan bamboo (*te're*). *te're se're n pasiru'ulu te're maraenganna* (pecahan bambu yang satu dipertemukan dengan pecahan bambu yang lainnya). Dimana pimpinan adat komunitas ini adalah

“*Ammatoa*” dan rumah tersebut mempunyai begasi (*tala-tala*) begasi ini berbeda pula dengan begasi rumah-rumah non kawasan *Ammatoa*.

Rumah adat suku Kajang sangat berbeda dengan rumah adat Bugis Makassar. Alat dan bahan rumah mereka masih natural meberdayakan isi alam sekitar sebagai pelengkap dari kekurangannya.

Selanjutnya masyarakat Kajang yang bertempat tinggal diluar kawasan adat *Ammatoa* dan tersebar di beberapa daerah telah mengalami perubahan sesuai dengan tuntutan zaman.

Masyarakat Kajang memiliki kepercayaan yang disebut patuntung. Ajaran ini secara sfesifik mangajarkan bahwa jika manusia hendak mendapat kebenaran, maka manusia harus menyandarkan diri pada tiga hal, taat kepada *Turie' Akrakna* (Tuhan) mensyukuri tanah yang diberikan *Turie' Akrakna* (Tuhan) juga warisan kebudayaan atau adat nenek moyang.

Kercayaan dan penghormatan terhadap *Turie' Akrakna* merupakan sebuah kesadaran primordial. Kesadaran ini menjadi kesadaran paling mendasar dalam agama patuntung. Bagi masyarakat Kajang, *Turie' Akrakna* adalah pencipta segala sesuatu di dunia. Ia memiliki sifat maha kekal, maha perkasa dan maha kuasa.

Turie' Akrakna dipercaya menurunkan perintahnya kepada masyarakat Kajang dalam bentuk *pasang* (sejenis wahyu dalam agama Abrahamik). Wahyu ini diturunkan kepada manusia pertama *Ammatoa*.

Pasang berarti pesan. Pesan ini tidak dapat dimaknai secara harfiah semata. Karena pesan yang dimaksud dalam wahyu tersebut adalah keseluruhan pengetahuan dan pengalaman tentang segala aspek dan liku-liku yang berkaitan dengan kehidupan yang dipesankan secara lisan oleh nenek moyang mereka dari generasi ke generasi.

Pasang yang diturunkan kepada *Ammatoa* harus ditaati, dipatuhi dan dilaksanakan oleh masyarakat adat *Ammatoa*. Jika mereka melanggar pasang, maka mereka tidak akan mendapatkan keselamatan dunia akhirat sebagaimana Tuhan Yang Maha Esa' menjajikan neraka baginya.

Pasang ri kajang:

“Punna surukki bebbekki, punna nilingkai pesokki”

Artinya:

“Kalau kita jongkok gugur rambut dan tidak tumbuh lagi dan kalau dilangkahi akan lumpuh”

Seperti yang telah disampaikan sebelumnya, bahwa masyarakat adat Kajang yang ada di Desa Tanah Tawo memiliki mata pencaharian sederhana seperti:

- a. Petani
- b. Tukan Kayu
- c. Penenum

Mereka pun menggunakan alat-alat sederhana. Aktivitas ini dilaksanakan oleh masyarakat Kajang tidak lain hanya memenuhi kebutuhan hidup semata. Mereka bertani ataupun kegiatan yang lain tidak berhasrat untuk memenuhi kebutuhan sekunder lainnya pula. Kesederhanaan mereka membuat masyarakat adat Kajang identik dengan istilah *Tallasa Kamase-Mase*, atau hidup bersahaja seperti yang telah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya, yang termasuk dalam *pasang* (pesan) ri Kajang.

“Ammentengko nu kamase-mase”.

“Accidongko nu kamase-mase”.

“A'lingkako nu kamase-mase”.

“A’miakko nu kamase-mase”.

Artinya:

“Berdiri engkau sederhana”.

“Duduk engkau sederhana”.

“berjalan engkau sederhana”.

“Berbicara engkau sederhana”.

Salah satu pasang dari segi ekonomi suku *Ammatoa* Kajang:

“Anre’ kalumannyang kalupepean”.

“Nurie’a pakkamase-maseanji”.

“Angnganreki nurie’a”.

“Care-care nurie’a”.

“Pammalli juku nurie’a”.

“Koko nurie’a”

“Bola situju-tujua”.

Artinya:

“Tidak ada kekayaan yang kekal”.

“Yang ada hanya kesederhanaan”.

“Makan secukupnya”.

“Pakaian yang secukupnya”

“Pembeli ikan yang secukupnya”.

“kebun Secukupnya”.

“Rumah seadanya”.

3. Gambaran Sejarah Terbentuknya Kawasan Adat *Ammatoa* Kajang

Masyarakat Kajang pada mulanya terdiri atas beberapa kaum. Mitos raja atau *Karaeng* (pemerintahan) selalu dikaitkan dengan *Tau Manurung* (orang yang turun ke bumi dan menjadi pemula lapisan keturunan bangsawan). Manusia pertama di Kajang adalah diturunkan dari kayangan atas kehendak Turie' *Akrakna* (Tuhan Yang Maha Esa) dan itulah yang disebut dengan *Tumanurung* dan menjadi *Ammatoa* (*Ammatoa Mariolo*). Ada beberapa mitos tentang manusia pertama, yaitu:

- a. Mitos pertama menyebutkan *Turie' Akrakna* memerintahkan kepada Batara Guru untuk melihat keadaan bumi, setelah kembali melaporkan bahwa perlu ada manusia diatas bumi, dengan mengendarai seekor burung berkepala dua yang disebut Koajang, inilah yang menjadi asal mulanya Kajang.
- b. *Ammatoa* merupakan manusia pertama yang diturunkan oleh *turie; Akrakna* ke dunia, masyarakat *Kajang* meyakini bahwa pertama kali *Ammatoa* diturunkan ke bumi adalah kawasan tempat tinggal mereka. Suku Kajang menyebut tana tempat tinggal mereka Tanah Towa (tanah tertua), tanah yang diwariskan oleh leluhur mereka.

Masyarakat *Ammatoa* mempraktekkan sebuah agama adat yang disebut dengan *patuntung*. Istilah *Patuntung* berasal dari *tuntunggi*, kata dalam bahasa Makassar yang jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia berarti mencari sumber kebenaran.

B. Kedudukan serta Dampak Hukum *Doi' Nai'* dalam Perkawinan Adat *Ammatoa*

Kata perkawinan menurut istilah hukum Islam sama dengan kata *nikah* dan kata *zawaj*. Nikah menurut bahasa mempunyai arti sebenarnya (*hakikat*) yakni *dham*

yang berarti menghimpit, menindih atau berkumpul. Nikah mempunyai arti kiasan yakni *watha* yang berarti setubuh atau *aqad* yang berarti mengadakan perjanjian pernikahan. Dalam kehidupan sehari-hari nikah dalam arti kiasan lebih banyak dipakai dalam arti sebenarnya jarang sekali dipakai saat ini.³⁹

Perkawinan amat penting dalam kehidupan manusia baik perseorangan maupun kelompok. Karena dengan jalan perkawinan yang sah, pergaulan laki-laki dan perempuan terjadi secara sah dan terhormat sesuai dengan kedudukan manusia sebagai makhluk Tuhan yang berkehormatan.

Proses perkawinan tiap-tiap daerah selalu menjadi hal yang sangat menarik untuk dibahas, baik dari segi latar belakang budaya perkawinan tersebut, maupun dari segi kompleksitas perkawinan itu sendiri. Oleh karena dalam perkawinan yang terjadi bukan hanya sekedar menyatukan dua orang yang saling mencintai. Lebih dari itu, ada nilai yang tidak lepas untuk dipertimbangkan dalam perkawinan, seperti status sosial, ekonomi, dan nilai-nilai budaya dari masing-masing keluarga laki-laki dan perempuan. Kompleksitas perkawinan pada masyarakat *Ammatoa* merupakan nilai-nilai yang tak lepas untuk dipertimbangkan dalam perkawinan.

Dalam pelaksanaan perkawinan masyarakat *Ammatoa* ada tiga hukum yang mengatur yaitu hukum agama, hukum positif, dan hukum adat. Perkawinan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan adat dan kebudayaan masyarakat *Ammatoa*. Dalam adat perkawinan masyarakat *Ammatoa* memiliki tradisi yang paling kompleks dan melibatkan banyak emosi. Bagaimana tidak, mulai dari ritual lamaran hingga selesai resepsi perkawinan akan melibatkan seluruh keluarga yang berkaitan dengan kedua pasangan calon mempelai. Salah satu tradisi tersebut

³⁹Abd. Shomad, *Hukum Islam penormaan prinsip Syariah dalam hukum Indonesia*, (Kencana Pranda Media Group, Jakarta, 2010), h. 272

adalah adanya kewajiban memberikan *doi' nai'* dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan sebagai syarat terlaksananya perkawinan. *Doi' nai'* adalah sejumlah uang yang diberikan oleh calon mempelai laki-laki kepada calon mempelai perempuan yang nantinya akan digunakan untuk keperluan mengadakan pesta perkawinan dan belanja perkawinan lainnya. *Doi' nai'* ini tidak terhitung sebagai mahar perkawinan, melainkan kedudukannya sebagai *doi'* adat yang terbilang wajib dengan jumlah yang telah disepakati oleh keluarga kedua belah pihak dan menjadi penentu berlanjutnya rencana perkawinan ke tahap selanjutnya.⁴⁰

Fenomena jumlah pemberian *doi' nai'* yang tinggi sehingga menghasilkan sebuah pesta perkawinan yang mewah sebenarnya hanya berlaku bagi keluarga kerajaan atau golongan bangsawan, namun, sekarang mengalami pergeseran dan mulai dipraktekkan masyarakat umum Suku *Ammatoa*. Dalam hukum Islam memang tidak ada kewajiban memberikan *doi' nai'*. Pemberian wajib ketika akan melangsungkan sebuah perkawinan dalam hukum Islam hanyalah mahar sebagai bukti cinta kasih suami kepada istrinya. Sedangkan pemberian wajib *doi' nai'* adalah tradisi adat *Ammatoa* saja.

Pemberian *doi' nai'* pada masyarakat *Ammatoa* kecamatan kajang Kabupaten Bulukumba merupakan salah satu tahap dalam tradisi perkawinan *Ammatoa* yaitu pada tahap *mappettu ada* (lamaran). Dimana pihak laki-laki berkunjung ke tempat pihak perempuan untuk membicarakan waktu pernikahan, jumlah mas kawin, dan mendengar serta melakukan penawaran atas permintaan *doi' nai'* yang disampaikan langsung oleh pihak perempuan. Apabila lamaran telah diterima maka tahap

⁴⁰Laling, Pemangku Adat (*Ammatoa*) Desa Tanah Towa, Wawancara, Kec. Kajang Kabupaten Bulukumba, 06 Mei 2017.

selanjutnya adalah penentuan jumlah *doi' nai'* yang ditentukan terlebih dahulu oleh pihak perempuan yang dilamar. Terkadang terjadi proses tawar menawar sehingga mencapai kesepakatan yang diinginkan. Dan jika pihak laki-laki menyanggupi maka tahap perkawinan selanjutnya bisa segera dilangsungkan.⁴¹

Penentuan nominal *doi' nai'* bagi wanita *Ammatoa* beragam tergantung dari silsilah keluarga, status sosial, pendidikan, pekerjaan, umur dan lain-lain. Dapat dilihat apabila wanita tersebut keturunan bangsawan atau pendidikan dan pekerjaannya mapan, maka terkadang *doi' nai'* yang harus disiapkan calon mempelai laki-laki juga harus tinggi.

Pengaruh penentuan jumlah *doi' nai'* juga menjadi suatu cara untuk dapat mengangkat status sosial dalam masyarakat. Bagi pihak keluarga perempuan dapat mematok jumlah *doi' nai'* yang tinggi adalah suatu kehormatan tersendiri. Kehormatan yang dimaksudkan disini adalah rasa penghargaan yang diberikan oleh pihak calon mempelai laki-laki kepada perempuan yang ingin dinikahinya dengan memberikan pesta yang megah untuk pernikahannya melalui *doi Nai'* tersebut. Selain itu penentuan jumlah *doi' nai'* juga merupakan penolakan lamaran secara halus sehingga tidak jadi untuk melamar. Dalam hukum adat hal ini disebut perbuatan pura-pura.

Bagi pria lokal atau yang juga berasal dari Suku *Ammatoa*, memenuhi jumlah *doi' nai'* juga dapat dipandang sebagai praktik budaya *siri'*, jadi perempuan yang benar-benar dicintainya dapat dijadikan sebagai motivasi yang sangat besar untuk memenuhi jumlah *doi' nai'* yang disyaratkan. Motivasi dapat diartikan sebagai faktor pendorong yang berasal dalam diri manusia dalam hal ini untuk memenuhi jumlah

⁴¹Upa, Pemangku Adat *Ammatoa* Desa Tanag Towa, wawancara, Kec. Kajang, Kab. Bulukumba, 06 Mei 2017.

doi' nai', yang akan kemudian mempengaruhi cara bertindak seseorang. Dengan demikian, motivasi kerja akan berpengaruh terhadap kinerjanya selama bekerja. Contohnya saat laki-laki tersebut tidak mampu memenuhi permintaan *doi' nai'*, umumnya untuk menebus rasa malu seorang laki-laki pergi merantau untuk bekerja dan menghasilkan uang dan kembali ke kampung halaman dengan tujuan untuk memenuhi *doi' nai'* yang telah disyaratkan sebelumnya.⁴²

Umumnya, masyarakat *Ammatoa* beranggapan bahwa uang serahan yang diterima pihak pengantin perempuan sebagai uang belanja (*doi' belanja*) akan digunakan untuk acara resepsi yang mereka selenggarakan berkaitan dengan kedatangan mempelai laki-laki. Tidak jarang mereka membelanjakan jauh lebih banyak, sehingga tambahan uang dari tamu resepsi (jumlahnya sedikit lebih kecil ketimbang uang belanja) tidak dapat menutupi biaya keseluruhan. Ketika penyelenggara pihak mempelai laki-laki menggelar resepsi yang terpisah yang merupakan rangkaian kunjungan balasan ke pengantin laki-laki, mereka mengundang sejumlah tamu yang kisarannya sama dengan jumlah undangan yang disebar pihak mempelai perempuan. Dengan demikian jumlah uang belanja menjadi penentu bagi terselenggaranya pesta yang mencolok dan besarnya jumlah tamu yang hadir di kedua belah pihak. Sementara penyelenggara dari pihak laki-laki, yang umumnya hanya bisa menutupi tidak lebih dari setengah total biaya resepsi, telah mulai menyiapkan uang belanja dan biaya resepsi jauh sebelumnya. *Doi; nai'*, dengan demikian, menjadi penanda status yang boros, bersifat pamer, dan agresif.

⁴²Ngerinya *Doi' Nai'* Untuk Melamar Wanita *Ammatoa-Kajang*, [https:// Fridayaniabdulkarim.Wordpres.com](https://Fridayaniabdulkarim.Wordpres.com), diakses tanggal 29 Mei 2017, pukul 19.55 Wita.

Pihak keluarga (saudara ayah atau ibu), memiliki pengaruh yang cukup penting dalam pengambilan keputusan mengenai besarnya *doi' nai'* dan mahar. Terkadang ibu-ibu di lingkungan sekitar juga turut andil dalam penentuan jumlah *doi' nai'* tersebut. Alasannya karena ibu-ibu lah yang banyak mengetahui harga bahan makanan ataupun peralatan lainnya di pasar.⁴³ Tidak jarang, banyak lamaran yang akhirnya tidak diteruskan, karena tidak bertemunya keinginan dua pihak. Ironisnya bersumber dari keluarga ayah atau ibu.

Doi' nai' memang menjadi gengsi sosial demi menjaga martabat keluarga karena dengan adanya pertimbangan persepsi orang lain di luar keluarga kedua mempelai. Jika ada perkawinan, maka yang seringkali jadi buah bibir utama adalah berapa *doi' nai'* nya. Dari sinilah dapat terlihat jelas bahwa *doi' nai'* sangat dijadikan momok penting untuk mengangkat citra suatu keluarga dan sebagai gengsi dalam kehidupan mereka.⁴⁴

Salah satu contoh gengsi sosial yang terjadi di lingkungan masyarakat *Ammatoa* yaitu jika suatu keluarga pernah melaksanakan pesta perkawinan yang megah karena memang sanggup melaksanakannya, kemudian tetangganya ingin mengadakan pesta yang mewah juga akan tetapi standar rumah dan penghasilan berbeda. Sehingga keluarga tersebut memaksakan kehendaknya untuk memenuhi keinginannya melaksanakan pesta yang mewah.

Istilah bugis yang menyangkut soal gengsi adalah "*Manna Rakko Yang Penting Maimmi Pallu*". Artinya walaupun kering (habis), yang penting pernah

⁴³Lateng, Pemangku Adat (Galla Puto), wawancara, Kec. Kajang, Kabupaten Bulukumba, 06 Mei 2017.

⁴⁴Lateng, Pemangku Adat (Galla Puto), wawancara, Kec. Kajang, Kabupaten Bulukumba, 06 Mei 2017.

masak. Maksud dari istilah tersebut adalah walaupun habis-habisan membiayai pesta perkawinan yang megah padahal hasil utang sana-sini asalkan sudah diperlihatkan.

Adapun dampak hukum jika pihak laki-laki tidak mampu menyanggupi jumlah *doi' nai'* yang telah ditargetkan, maka secara otomatis perkawinan akan batal dan pada umumnya implikasi yang muncul adalah pihak laki-laki dan perempuan mendapat cibiran atau hinaan di kalangan masyarakat setempat, dan biasanya hubungan antar kedua keluarga bisa renggang. Selain itu banyak laki-laki yang enggan menikah karena banyaknya tuntutan yang harus disiapkan oleh pihak laki-laki demi sebuah perkawinan. Tidak sedikit perempuan yang tidak kawin dan menjadi perawan tua. Bahkan bisa fatal bagi laki-laki jika tidak mampu menyanggupi jumlah *doi' nai'* dan sudah saling mencintai tapi tetap ingin bersama sehingga menghalalkan berbagai cara. Diantaranya laki-laki tersebut berhutang demi mendapatkan uang yang disyaratkan pihak perempuan. Adapula yang bahkan menghamili perempuan yang ingin dinikahinya. Sehingga *doi' nai'* tidak begitu dipermasalahkan. Terkadang juga sepasang laki-laki dan perempuan tersebut melakukan kawin lari atau dalam istilah konjo disebut silariang. Selain karena laki-laki tidak bisa menyanggupi tingginya jumlah *doi' nai'* yang telah dipatok pihak keluarga perempuan sehingga perkawinannya batal, biasanya faktor lain adalah karena strata sosial laki-laki rendah dibanding strata sosial pihak keluarga perempuan yang keturunan bangsawan. Selain itu adapula dampak positif dari tingginya jumlah *doi' nai'* yaitu tingginya jumlah *doi' nai'* yang telah dipatok pihak perempuan dapat menjadi tindakan preventif agar pasangan suami istri kedepannya berpikir untuk tidak berpisah.⁴⁵

⁴⁵Patong, Pemangku Adat *Ammatoa* (Desa Tanah Towa), Kec. Kajang Kab. Bulukumba, Wawancara, 06 Mei 2017.

Dewasa ini, interpretasi yang muncul dalam pemahaman sebagian orang *ammatoa* tentang pemberian dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan yang termasuk pembiayaan dalam perkawinan masih kurang. Dalam adat perkawinan *Ammatoa* khususnya di Desa Tanah Towa Kecamatan kajang Kabupaten Bulukumba, terdapat beberapa istilah pemberian yaitu diantaranya adalah *sompa*, *doi' nai'*, *erang-erang*, *bosara* (berisi kue-kue tradisional), *alasoji* (berisi buah-buahan), *tuju lima suku/tellu lima suku/kalisunrang* (7/3 buah ringgit perak), *passikko* (cincin pengikat).

Sompa atau mahar adalah pemberian berupa uang atau harta dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan sebagai syarat sahnya perkawinan menurut ajaran Islam. Bentuk *sompa* ini beragam. Di Desa Tanah Towa, selain uang dan emas, biasanya juga *sompanya* berupa tanah, rumah, pohon cengkeh, dan pohon kelapa (tidak termasuk tanah, hanya pohon beserta buahnya).

Sompa berupa tanah umumnya dijumpai pada golongan bangsawan, yang merupakan kebiasaan yang telah dipertahankan dalam perkawinan adat *Ammatoa* pada umumnya. Hal ini sekaligus melambangkan tanda kebesaran suatu kerabat dan tingkat sosial seseorang dalam hal ini menyangkut perkawinan Adat *Ammatoa*. Sedangkan *doi' nai'* adalah sejumlah uang yang harus diserahkan oleh pihak keluarga laki-laki kepada pihak keluarga perempuan untuk membiayai prosesi pesta perkawinan.⁴⁶

Adapun *bosara* dan *alasoji* adalah sajian-sajian berupa kue-kue tradisional dan buah-buahan yang di berikan kepada pihak keluarga perempuan dari pihak keluarga laki-laki. Kue-kue tradisioanl dan buah-buahan ini tidak hanya sekedar

⁴⁶Pe'le, Tokoh Adat (Petani),(*Ammatoa*) Desa Tanah Towa, Kec. Kajang Kab. Bulukumba, Wawancara, 06 Mei 2017.

makanan, tapi mengandung makna tersendiri yang berupa doa-doa yang baik untuk kedua mempelai kedepannya. Serta *kalisunrang* dan *passikko* adalah perhiasan yang juga memiliki makna yang terkandung di dalamnya.⁴⁷

Di balik itu semua bukan sekedar ritual belakang, bukan sekedar pemberian saja, akan tetapi ada makna yang terkandung sebelum masuk ke jenjang perkawinan. Nilai ritualnya mengandung nilai filosofis yang terkait pembelajaran. Di balik ribetnya prosesi adat perkawinan masyarakat *Ammatoa*, ada nilai doa yang terkandung. Doa dalam bentuk simbol yaitu *Tafa'ul* dalam Islam sedangkan istilah Kajang adalah *rannu-rannuang*.⁴⁸

Sebagai suatu ketentuan wajib dalam perkawinan, berdasarkan unsur-unsur yang ada di dalamnya dapat dikatakan bahwa *doi' nai'* mengandung tiga makna, yaitu sebagai berikut:

1. Dilihat dari kedudukannya *doi' nai'* merupakan rukun perkawinan di kalangan masyarakat *Ammatoa* di Kecamatan Kajang dan Kabupaten Bulukumba.
2. Dari segi fungsinya *doi' nai'* merupakan pemberian hadiah bagi pihak mempelai perempuan sebagai biaya respsi perkawinan dan bekal dikehidupan kelak yang sudah berlaku secara turun temurun mengikuti adat istiadat.
3. Dari segi tujuannya pemberian *doi' nai'* adalah untuk memberikan *prestise* (kehormatan) bagi pihak keluarga perempuan jika jumlah *doi' nai'* yang di patok mampu dipenuhi oleh calon mempelai laki-laki. Kehormatan yang dimaksud disini adalah rasa penghargaan yang diberikan oleh pihak calon

⁴⁷Yusuf, Tokoh Adat (Swasta), (*Ammatoa*) Desa Tanah Towa, Kec. Kajang Kab. Bulukumba, Wawancara, 06 Mei 2017.

⁴⁸Laling, Pemangku Adat (*Ammatoa*) Desa Tanah Towa, Kec. Kajang Kab. Bulukumba, Wawancara, 06 Mei 2017.

mempelai laki-laki kepada perempuan yang akan dinikahinya dengan memberikan pesta yang megah untuk pernikahannya melalui *doi' nai'* tersebut.

C. Tinjauan Hukum Islam Tentang *Doi' Nai'* dalam Perkawinan Adat *Ammatoa*

Sesungguhnya Islam telah memberikan tuntunan kepada pemeluk-Nya yang akan memasuki jenjang perkawinan, lengkap dengan tata cara atau aturan-aturan Allah swt. Sehingga mereka yang tergolong ahli ibadah, tidak akan memilih tata cara yang lain. Namun kenyatannya di masyarakat kita, hal ini tidak banyak diketahui orang. Bahkan mereka memiliki cara tersendiri yang telah turun temurun dilaksanakan.

Dalam masalah perkawinan sesungguhnya Islam telah mengatur sedemikian rupa. Dari mulai bagaimana mencari calon pendamping hidup sampai mewujudkan sebuah pesta perkawinan. Walaupun sederhana tetapi penuh berkah dan tetap terlihat mempesona. Islam juga menuntun bagaimana memperlakukan calon pendamping hidup setelah resmi menjadi sang penyejuk hati.

Perkawinan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan adat dan kebudayaan masyarakat Kajang. Dalam pelaksanaan perkawinan masyarakat Kajang khususnya di Desa tanah towa kecamatan kanjang Kabupaten Bulukumba memiliki tradisi tersendiri yang menyangkut tentang perkawinan. Mulai dari menentukan pasangan hidup sampai dengan terwujudnya satu pesta perkawinan. Dalam pelaksanaan tradisi perkawinan *Ammatoa* terdapat tahap-tahap yang wajib dilakukan oleh masyarakat yang ingin melangsungkan perkawinan. Jika salah satu tahap tersebut tidak dilaksanakan maka perkawinan itu dinilai kurang sempurna bahkan dapat mengakibatkan batalnya perkawinan. Dan dibalik tahap-tahap tradisi itu semua

hal memiliki makna yang terkandung di dalamnya. Salah satu tradisi dalam masyarakat *Ammatoa* yang dibahas dalam skripsi ini adalah tentang pemberian *doi' nai'*.

Di Desa Tanah Towa, adat yang pertama kali menyentuh masyarakatnya. Islam kemudian masuk setelah tahun 1609. Sehingga adat yang mendominasi masyarakat *Ammatoa* tapi Islam juga tetap berjalan. Islam datang tidak hampa budaya. Islam seperti saringan, Yang halus tetap jalan sedangkan yang kasar tersangkut. Artinya, tradisi yang bagus dalam adat tetap dilanjutkan. Sehubungan dengan hal tersebut, dalam Islam yang diwajibkan adalah mahar sedangkan *doi' nai'* dalam Islam tidak diwajibkan. Dalam adat *Ammatoa*, *doi'' nai'* harus ada akan tetapi tidak perlu di berikan ketentuan, yang penting *sitinajai*.⁴⁹

Sitinajai adalah istilah dalam masyarakat *Ammatoa* yang artinya sesuai atau sewajarnya. Dalam hal penentuan jumlah *doi' nai'*, harus sesuai dengan kemampuan dan kesanggupan dan tidak dipaksakan, *sitinajai*.

Pelaksanaan pemberian *doi' nai'* walaupun tidak tercantum dalam hukum Islam, hal ini tidak bertentangan dengan Syari'at dan tidak merusak akidah karena salah satu fungsi dari pemberian *doi' nai'* adalah sebagai hadiah bagi mempelai perempuan untuk bekal kehidupannya kelak dalam menghadapi bahtera rumah tangga dan ini merupakan *maslahat* baik bagi pihak mempelai laki-laki dan mempelai perempuan. Adat seperti ini sering disebut dengan '*urf sahih* yaitu adat yang baik, sudah benar dan bisa dijadikan sebagai pertimbangan hukum.⁵⁰

⁴⁹Laling, Pemangku Adat *Ammatoa* Desa Tanah Towa, Kec. Kajang Kab. Bulukumba, Wawancara, 06 Mei 2017.

⁵⁰Laling, Pemangku Adat *Ammatoa*) Desa Tanah Towa, Kec. Kajang Kab. Bulukumba, Wawancara, 06 Mei 2017.

Mahar dan *doi' nai'* dalam perkawinan adat *Ammatoa* adalah suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Karena dalam prakteknya kedua hal tersebut memiliki posisi yang sama dalam hal kewajiban dan harus dipenuhi. Akan tetapi *doi' nai'* lebih mendapatkan perhatian dan dianggap sebagai suatu hal yang sangat menentukan kelancaran jalannya proses perkawinan. Sehingga jumlah *doi' nai'* yang ditentukan oleh pihak keluarga perempuan biasanya lebih banyak daripada jumlah mahar yang diminta.

Idelanya dalam Islam *doi' nai'* itu jangan ditentukan jumlahnya apalagi sampai jumlahnya tinggi. Yang penting ada dan sesuai kemampuan laki-laki. Sedangkan yang perlu jumlahnya tinggi adalah *sompa*. Karena *sompa* adalah hak milik istri yang akan digunakan kedepannya sedangkan *doi' nai'* akan habis terpakai untuk membiayai pesta perkawinan. Sehingga akan lebih baik apabila jumlah *doi' nai'* sama dengan jumlah *sompa* atau jumlah *sompa* lebih tinggi daripada jumlah *doi' nai'*.⁵¹

Walaupun kenyataannya sekarang terbalik, justru *doi' nai'* yang tinggi sementara *sompa*-Nya rendah. *Doi' nai'* bisa mencapai ratusan juta rupiah karena dipengaruhi beberapa faktor, justru sebaliknya mahar atau *sompa* yang tidak terlalu dipermasalahkan jumlah nominalnya diserahkan kepada kerelaan suami.

Mengenai masalah tersebut di atas dalam sebuah hadist Rasul bersabda yang maknanya bahwa perkawinan yang paling besar berkahnya adalah yang paling murah maharnya. melihat dari makna hadist tersebut maka jelaslah sangat tidak etis jika *doi' nai'* yang diberikan oleh calon mempelai laki-laki lebih banyak daripada jumlah *sompa*. Hadist tersebut menganjurkan kepada perempuan agar meringankan pihak

⁵¹Pe'le, Tokoh Adat (Petani),(*Ammatoa*) Desa Tanah Towa, Kec. Kajang Kab. Bulukumba, Wawancara, 06 Mei 2017.

laki-laki untuk menunaikan kewajibannya membayar mahar apalagi *doi' nai'* yang sama sekali tidak ada ketentuan wajibnya dalam hukum Islam. *Doi' nai'* tetap ada tapi *sitinajai*.

Selama pemberian *doi' nai'* tidak mempersulit terjadinya perkawinan maka hal tersebut tidak bertentangan dengan hukum Islam dan yang paling penting adalah jangan sampai ada unsur keterpaksaan memberikan *doi' nai'* yang akan memicu terjadinya perbuatan yang tidak baik karena ingin menghalalkan berbagai cara untuk mendapatkan uang.

Ada prinsip dalam masyarakat *Ammatoa* yang perlu diubah sedikit demi sedikit yaitu terkadang orang tua pihak perempuan yang ditunggu hanyalah *doi' nai'* tersebut yang akan digunakan untuk pesta. Padahal kewajiban orang tua ada tiga kepada anaknya. Yang pertama adalah berikanlah nama yang baik, kedua berikanlah pendidikan yang baik, dan yang ketiga adalah menikahkan anak. Jadi sewajarnya orang tua juga menyediakan uang untuk perkawinan anaknya kelak. Jadi jangan hanya mengandalkan *doi' nai'*. Bahkan orang tua yang baik adalah orang tua yang tidak menggunkan *doi' nai'* yang telah diberikan oleh pihak laki laki tapi *doi' nai'* tersebut diberikan kepada anaknya untuk kebutuhannya setelah berkeluarga.⁵²

Agama Islam sebagai agama *rahmatan li alamin* tidak menyukai penentuan mahar yang memberatkan pihak laki-laki untuk melangsungkan perkawinan, demikian pula *doi' nai'* dianjurkan agar tidak memberatkan bagi pihak yang mempunyai niat suci untuk menikah. Perkawinan sebagai sunnah Nabi hendaknya dilakukan dengan penuh kesederhanaan dan tidak berlebih-lebihan sehingga tidak ada unsur pemborosan di dalamnya karena islam sangat menentang pemborosan. Dalam

⁵²Patong, Pemangku Adat *Ammatoa* (Desa Tanah Towa), Kec. Kajang Kab. Bulukumba, Wawancara, 06 Mei 2017.

hukum Islam dikenal prinsip mengutamakan kemudahan dalam segala urusan. Terlebih lagi dalam urusan perkawinan prinsip ini sangat ditekankan.

Yang menjadi tolok ukur tingginya jumlah *doi' nai'* adalah sebagai berikut:

1. Ekonomi. Jika salah satu pihak baik itu pihak dari laki-laki maupun pihak perempuan yang berasal dari keluarga yang memiliki ekonomi mapan maka jumlah *doi' nai'* yang diminta pun bisa sangat tinggi.
2. Pendidikan dan pekerjaan. Jika salah satu pihak baik itu pihak dari laki-laki maupun pihak perempuan memiliki pekerjaan misalnya seorang dokter atau memiliki gelar S1 atau S2 maka permintaan *doi' nai'* juga tinggi.
3. Keturunan. Jika salah satu pihak baik itu pihak dari laki-laki maupun pihak perempuan yang berasal dari keturunan bangswan maka permintaan *doi' nai'* juga tinggi.
4. Strata sosial. Jika salah satu pihak baik itu pihak dari laki-laki maupun pihak perempuan memiliki strata sosial yang tinggi dalam masyarakat seperti Lurah, Camat, dan lain-lain maka hal tersebut akan berpengaruh pada tingginya jumlah *doi' nai'* yang diminta pihak perempuan kepada pihak laki-laki.
5. Umur. Jika calon mempelai perempuan masih gadis, maka jumlah *doi' nai'* yang diminta pun bisa sangat tinggi.
6. Kondisi fisik. Jika calon mempelai perempuan memiliki paras yang cantik, kulit putih, maka jumlah *doi' na'* yang diminta pun bisa sangat tinggi.

Agama Islam tidak membedakan manusia satu sama lain. Tidak ada perbedaan status sosial dan kondisi seseorang. Semua sama di mata Allah mempunyai derajat dan kedudukan yang sama. Yang membedakannya hanyalah ketakwaannya.

Al ‘adatu muhakkamah artinya adat itu bisa diterima dan menjadi hukum jika sudah menjadi kesepakatan. Hukum Islam mengakui adat sebagai sumber hukum karena sadar akan kenyataan bahwa adat kebiasaan telah mendapatkan peran penting dalam mengatur hubungan sosial di kalangan anggota masyarakat. Adat sebagai tatanan yang disepakati oleh masyarakat yang tidak tertulis tapi tetap dipatuhi karena dirasakan sesuai dengan kesadaran hukum sendiri.

Sebelum Nabi Muhammad saw diutus, adat kebiasaan sudah banyak berlaku pada masyarakat dari berbagai penjuru dunia. Adat kebiasaan yang dibangun oleh nilai-nilai yang dianggap baik dari masyarakat itu sendiri, yang kemudian diciptakan, dipahami, disepakati, dan dijalankan atas dasar kesadaran. Nilai-nilai yang dijalankan terkadang tidak sejalan dengan ajaran Islam dan ada pula yang sudah sesuai dengan ajaran Islam. Agama Islam sebagai agama yang penuh rahmat menerima adat dan budaya selama tidak bertentangan dengan Syari’at islam dan kebiasaan tersebut telah menjadi suatu ketentuan yang harus dilakukan dan dianggap sebagai aturan yang harus ditaati.

Adat dapat dijadikan sebagai sumber hukum Islam jika memenuhi syarat sebagai berikut:

1. Tidak bertentangan dengan *nash*.
2. Apabila adat itu telah menjadi adat yang terus menerus berlaku dan berkembang dalam masyarakat.
3. Berulang kali terjadi dan sudah umum dalam masyarakat.

Adat dan kebiasaan selalu berubah-ubah dan berbeda-beda sesuai dengan perubahan zaman dan keadaan. Realitas yang ada dalam masyarakat berjalan terus menerus sesuai dengan kemaslahatan manusia karena berubahnya gejala sosial

kemasyarakatan. Oleh karena itu, kemaslahatan manusia menjadi dasar setiap macam hukum. Maka sudah menjadi kewajiban apabila terjadi perubahan hukum karena disebabkan perubahan zaman dan keadaan serta pengaruh dari gejala masyarakat itu sendiri.

Pemberian *doi' nai'* dalam perkawinan adat *Ammatoa* merupakan pemberian sejumlah uang untuk membiayai pesta perkawinan. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Islam tentang *walimah*. Walimah ini adalah salah satu bentuk rasa syukur setelah diadakannya akad nikah dengan jamuan makan bagi para tamu undangan, kerabat dan sanak keluarga. Walimah atas perkawinan itu sunnah hukumnya dan wajib hukumnya bagi yang memenuhi undangan kecuali berhalangan.

Dalam sebuah hadist diriwayatkan bahwa Nabi saw juga pernah mengadakan walimah nikah untuk sebagian istrinya yaitu saat menikah dengan Ummu Salamah dengan 2 mud gandum dan juga saat menikah dengan Shafiyah dengan kurma. Dalam potongan hadist lain yang diriwayatkan Syaikhhan, Nabi saw bersabda "*berwalimahlah walaupun dengan menyembelih kambing.*" Kemudian sabda lain yang diriwayatkan Turmudzi bahwa "*perlihatkan nikah itu dan pukullah terbangun atasnya.*"⁵³

Hadist tersebut di atas jelas menerangkan ketentuan berwalimah. Pada zaman sekarang walimah diartikan sebagai pesta perkawinan. Hal ini sehubungan dengan penyediaan sejumlah *doi' nai'* untuk membiayai jalannya pesta perkawinan. Hanya saja seiring berkembangnya zaman maka jumlah *doi' nai'* dari zaman ke zaman semakin tinggi. Karena semakin tinggi pula harga bahan pokok di pasaran maka

⁵³H. Moch. Anwar, *Fiqih Islam*, (Bandung, PT.Alma'arif, 1983), h. 171

permintaan *doi' nai'* pun juga tinggi. Hal ini lah yang salah satunya melatarbelakangi jumlah *doi' nai'*.

Seperti itulah pemberian *doi' nai'* di desa tanah towa kecamatan kajang Kabupaten Bulukumba tidak dapat ditinggalkan dan sudah menjadi tradisi turun temurun dalam diri masyarakat. Pemberian *doi' nai'* pada masyarakat ini walaupun tidak diatur secara tertulis.

Kebanyakan masyarakat Kajang Desa Tanah Towa Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba dalam menjalankan kebiasaan memberikan *doi' nai'* tidak merasa terbebani dan tidak menganggap itu merupakan sesuatu hal yang buruk, sehingga hal ini sudah dianggap kebiasaan baik yang memang harus ditunaikan bagi para pihak yang akan menikahi gadis Ammatoa.

Adat yang dikenal baik dan dijalankan secara terus menerus dan berulang-ulang serta dianggap baik oleh mereka, maka tidak bisa diharamkan baik oleh Islam maupun hukum yang berlaku.

Dalam Islam, setidaknya ada 5 hukum syara' yang disepakati yaitu wajib, haram, makruh, mubah, dan sunnah. Penjelasan nya adalah sebagai berikut:

1. Wajib, yakni sebuah tuntutan yang pasti untuk mengerjakan perbuatan. Apabila dikerjakan mendapat pahala, sedangkan bila ditinggalkan maka berdosa.
2. Sunnah, yakni sebuah anjuran mengerjakan yang sifatnya tidak pasti. Apabila dikerjakan mendapat pahala, namun apabila tidak dikerjakan tidak berdosa.
3. Mubah, artinya boleh dikerjakan boleh juga ditinggalkan. Apabila dikerjakan atau ditinggalkan tidak apa-apa, tidak mendapatkan pahala atau pun disiksa.

4. Makruh, yakni sebuah tuntutan yang tidak pasti untuk meninggalkan perbuatan tertentu. Apabila dikerjakan tidak apa-apa, namun bila ditinggalkan akan mendapatkan pahala dan dipuji.
5. Haram, yakni tuntutan yang pasti untuk meninggalkan sesuatu. apabila dikerjakan oleh seorang mukallaf maka mendapatkan dosa, namun bila ditinggalkan akan mendapat pahala.

Hukum dari pemberian *doi' nai'* itu sendiri menurut Islam adalah mubah. Tapi jika sudah masuk ke dalam adat maka hukumnya adalah wajib. Karena ada kaedah dalam hukum Islam. Hukum itu berputar sesuai dengan kondisi.⁵⁴

Pemberian *doi' nai'* merupakan tradisi yang bersifat umum, dalam artian berlaku pada setiap orang yang bersuku *Ammatoa* khususnya desa tanah towa kecamatan kajang Kabupaten Bulukumba. Walaupun pemberian *doi' nai'* ini tidak secara gamblang diatur dalam hukum Islam, namun pemberian *doi' nai'* sudah merupakan suatu tradisi yang harus dilakukan pada masyarakat tersebut dan selama hal ini tidak bertentangan dengan akidah dan syari'at maka hal itu diperbolehkan.

⁵⁴Upa, Pemangku Adat (*Ammatoa*) Desa Tanag Towa, wawancara, Kec. Kajang, Kab. Bulukumba, 06 Mei 2017.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kedudukan *Doi' Nai'* dalam perkawinan adat *Ammatoa* adalah sebagai salah satu pra syarat, karena apabila *Doi' Nai'* tidak ada, maka perkawinan tidak ada. Pemberian sejumlah *Doi' Nai'* adalah pemberian wajib yang diberikan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan yang fungsinya sebagai biaya yang digunakan dalam pesta perkawinan. Tujuannya adalah untuk menghormati keluarga pihak perempuan. Penghormatan maksudnya adalah rasa penghargaan yang diberikan kepada perempuan yang ingin dinikahnya dengan memberikan pesta yang megah. Juga sebagai tanda cinta kasih kepada perempuan yang ingin dinikahnya. Tingginya nilai *Doi' Nai'* sangat berpengaruh oleh status sosial dalam masyarakat, pekerjaan, pendidikan, umur, keturunan, kondisi fisik, dan pendidikan. Adapun dampak yang ditimbulkan akibat tingginya penentuan jumlah *Doi' Nai'* yaitu batal menikah, hubungan antara kedua keluarga bisa menjadi renggang, laki-laki yang enggan menikah, perawan tua, *silariang*, bahkan bisa fatal bagi laki-laki karena dengan sengaja merusak (menghamili) perempuan yang ingin dinikahi.
2. Tinjauan hukum Islam tentang *Doi' nai'* menjelaskan bahwa tidak ada ketentuan yang mengatur tentang *Doi' nai'* dalam Islam. Akan tetapi hukumnya mubah, yang artinya boleh dilaksanakan karena tidak ada dalil yang melarang.

Jadi dikembalikan pada tradisi setempat, dan dalam proses pelaksanaannya tidak ada unsur paksaan, tergantung kesanggupan dan kemampuan. Yang penting dalam masyarakat Ammatoa *sitinajai*.

B. Implikasi Penelitian

1. Para tokoh adat hendaknya memberikan pemahaman yang lebih mendalam kepada masyarakat Ammatoa pada umumnya di desa tanah towa kecamatan kajang Kabupaten Bulukumba pada khususnya mengenai masalah *Doi' nai'*. Sehingga tidak menganggap *Doi' Nai'* sebagai pemberian wajib yang mutlak untuk perempuan yang ingin dinikahi melainkan sebagai biaya untuk melaksanakan pesta perkawinan. Serta tidak menjadikan *Doi' Nai'* sebagai tolak ukur kesuksesan sebuah pesta perkawinan. Lebih dari itu juga tidak menjadikan *Doi' Nai'* sebagai penghalang akan terlaksananya niat suci seorang laki-laki yang akan menikah dengan wanita yang dicintainya.
2. Jumlah pemberian *Doi' Nai'* seharusnya tidak ada batas nominalnya, hanya diserahkan kepada calon mempelai laki-laki sesuai kesanggupan (*Sitinajai*). Intinya adat dan agama tetap bisa sejalan. Jadi Islam datang tidak menghancurkan tradisi budaya yang ada, adat juga tetap berjalan. Itulah yang disebut kekayaan khazanah Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- al-Mufarraj, Sulaeman, Bekal Pernikahan. *Hukum, Tradisi, Hikma, Kisah, `Syair, Wasiat, Kata Mutiara, Alih Bahasa, Kuais Mandiri*. Cipta Persada, Jakarta: Qisthi Press, 2003.
- Assegaf, Abd. Rahman. *studi islam konstektual elaborasi paradigma baru muslim kaffa*. Yogyakarta: gama media, 2005.
- Abidin, Slamet, dan H. Amiruddin. *Fiqh Munakahat*. Bandung: Pustaka Setia, 1999.
- Abdul Mujid, M.. *Kamus Istilah Fiqh*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 1995.
- Anwar, Moch., *Fiqh Islam*. Bandung: PT. Alma'arif, 1983.
- Abbas, Muhammad. (36 Tahun), Sekretaris Desa Tanah Towa, *wawancara*, Tanah Towa 06 Mei 2017.
- Astra Arya, "Pergertian Perkawinan Adat, dalam Hukum hindu. <http://www.Or.id/Pengertian-Adat/>, (16 Januari 2017).
- Abd Aziz Muhammad Azzam, Abdul Wahhab Sayyid Wawwas. *Fiqh Munakahat; Khitbah, Nikah, dan Talak*. Amzah, Jakarta, 2009.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung, Jabal Raudhotul Jannah, 2009.
- Ghasaly, Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Prenada Media, 2003.
- Ghasaly, Abd. Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Prenada Media, 2003.
- Hakim, Rahmat. *Hukum Perkawinan Islam*. Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- Hakim. Abd Hamid *Mabadi Awaliyah*. Cet. I; Jakarta: Bulan Bintang, 1976.
- Lihat Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam.
- Nur, Djama. *Fiqh Munakahat*. Bengkulu: Dina Ulama Semarang (DIMAS), 1993.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Sudarsono, *Kamus Besar*. Jakarta: Rineka Cipta, 1992.
- Slamet Abidin Dan Amiruddin. *Fikih Munakahat I*. Bandung: Pustaka Setia, 1999.
- Supiana Dan M,Karman. *Materi Pendidikan Agama Islam*. Cet. III; Bandung: Remaja Rosdayakarya, 2004.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indinesia*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Soemiyati. *Hukum Perkawinan Islam Islam*. Yogyakarta, 1892.
- Samsuni, "Budaya Mahar Sulawesi Selatan", dalam [www. Melayuonline.com/](http://www.Melayuonline.com/) (16 Jabuari 2017).
- Sopyan, Yayan, *Metode Penelitian hukum*. Jakarta: Buku Ajar, 2009.

- Sunggono, Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007.
- Sukmadinata, Nana Syaodin, *Metode Penelitian Pendidikan*, Cet, II; Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006
- Sireger, Syofian, *Statistika Deskriptif Untuk Penelitian*, Cet, IV; Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Cet, 16; Bandung: Alfabeta, 2013.
- Shomad, Abd. *Hukum Islam penormaan prinsip Syariah dalam hukum Inonesia*, Kencana Pranda Media Group, Jakarta, 2010.
- Teer, Haar, . *Asas-asas dan Susunan Hukum Adat*. Jakarta: Pradnya Paramita, 1987.
- Tihami dan Sohari Sahrani. *Fiqh Munakahat (Kajian Fiqh Nikah Lengka)*. Rajawalipress, Jakarta, 2009.
- Puspita, "Tradisi Uang Panaik dalam Budaya Bugis Makassar," dalam <http://akulebihdariyangkautahu.blokspot/> (16 Januari 2017).

L

A

M

P

I

R

A

N







REKOMENDASI INFORMAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Yusuf
Tempat & tgl lahir : Buluk, 01 Desember 1984
Profesi : ~~Swasta~~
Alamat : Tanah Towa

Telah benar-benar melakukan wawancara yang berkaitan dengan "Doi' Nai' " dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul : "Tinjauan Hukum Islam Tentang Doi' Nai' dalam Perkawinan Adat Amma Towa Desa Tanah Towa Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba", oleh:

Nama : Sumarni
Nim : 10100113108
Semester : VIII (Delapan)
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Jurusan : Hukum Acara Peradilan dan Kekeluargaan
Prodi : Peradilan

Demikian surat ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Bulukumba,



.....

REKOMENDASI INFORMAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:


Nama : PE'LE
Tempat & tgl lahir : JANNAYA 01 JANUARI 1952
Profesi : PETANI
Alamat : DESA TANAH TOWA, DUSUN JANNAYA

Teilah benar-benar melakukan wawancara yang berkaitan dengan "Doi' Nai' " dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul : "Tinjauan Hukum Islam Tentang Doi' Nai' dalam Perkawinan Adat Amma Towa Desa Tanah Towa Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba", oleh:

Nama : Sumarni
Nim : 10100113108
Semester : VIII (Delapan)
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Jurusan : Hukum Acara Peradilan dan Kekeluargaan
Prodi : Peradilan

Demikian surat ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Bulukumba,


.....

REKOMENDASI INFORMAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Patong
Tempat & tgl lahir : Tanah Towa, 10 Juli 1959
Profesi : Pemangku adat Desa Tanah Towa
Alamat : Desa Tanah Towa Dusun Jannagya

Telah benar-benar melakukan wawancara yang berkaitan dengan "Doi' Nai' " dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul : "Tinjauan Hukum Islam Tentang Doi' Nai' dalam Perkawinan Adat Amma Towa Desa Tanah Towa Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba", oleh:

Nama : Sumarni
Nim : 10100113108
Semester : VIII (Delapan)
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Jurusan : Hukum Acara Peradilan dan Kekeluargaan
Prodi : Peradilan

Demikian surat ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Bulukumba,



REKOMENDASI INFORMAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:


Nama : LATENG
Tempat & tgl lahir : Bontol Baji, 02 Juli 1960
Profesi : Pemangkas Adat GALIA Roto
Alamat : Tanah Towa

Telah benar-benar melakukan wawancara yang berkaitan dengan “Doi’ Nai’ ” dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul : “Tinjauan Hukum Islam Tentang Doi’ Nai’ dalam Perkawinan Adat Amma Towa Desa Tanah Towa Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba”, oleh:

Nama : Sumarni
Nim : 10100113108
Semester : VIII (Delapan)
Fakultas : Syari’ah dan Hukum
Jurusan : Hukum Acara Peradilan dan Kekeuargaan
Prodi : Peradilan

Demikian surat ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Bulukumba,



.....

REKOMENDASI INFORMAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : UPA
Tempat & tgl lahir : TANAH TOWA, 08 Agustus 1962
Profesi : Petanngku adat Desa tanah Towa
Alamat : JANNIAYA

Teiah benar-benar melakukan wawancara yang berkaitan dengan “ Doi’ Nai’ ” dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul : “Tinjauan Hukum Islam Tentang Doi’ Nai’ dalam Perkawinan Adat Amma Towa Desa Tanah Towa Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba”, oleh:

Nama : Sumarni
Nim : 10100113103
Semester : VIII (Delapan)
Fakultas : Syari’ah dan Hukum
Jurusan : Hukum Acara Peradilan dan Kekeluargaan
Prodi : Peradilan

Demikian surat ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Bulukumba,


.....

REKOMENDASI INFORMAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

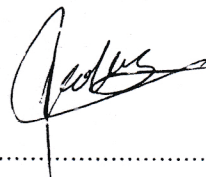
Nama : *Idung*
Tempat & tgl lahir : *Tanah Towa, 12 Desember 1961*
Profesi : *Perangike Adat Desa Tanah Towa*
Alamat : *TANAH TOWA DESA BALOGAN*

Telah benar-benar melakukan wawancara yang berkaitan dengan “Doi’ Nai’ ” dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul : “Tinjauan Hukum Islam Tentang Doi’ Nai’ dalam Perkawinan Adat Ainma Towa Desa Tanah Towa Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba”, oleh:

Nama : Sumarni
Nim : 10100113108
Semester : VIII (Delapan)
Fakultas : Syari’ah dan Hukum
Jurusan : Hukum Acara Peradilan dan Kekeluargaan
Prodi : Peradilan

Demikian surat ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Bulukumba,



.....



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Kampus I Jl. Sultan Alauddin No. 63 Makassar Tlp. (0411) 868720 Fax 864923
Kampus II Jl. H.M. Yasin Limpo No. 36 Samata Sungguminasa - Gowa Tlp. (0411) 841879 Fax 424836

Nomor : S1.1/PP.00.4/1769 2017
Sifat : Penting
Lamp : -
Hal : **PERMOHONAN IZIN PENELITIAN**

Samata, 27 April 2017

Kepada yth

Bapak Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan
Cq. Kepala UPT P2T BKPM D Prov. Sul-Sel.

Di
Makassar

Assalamu'Alaikum Wr. Wb

Dengan hormat disampaikan bahwa Mahasiswa UIN Alauddin Makassar yang tersebut namanya dibawah ini :

Nama	: Sumarni
Nim	: 10100113108
Fakultas/Jurusan	: Syari'ah dan Hukum /Peradilan
Semester	: VIII (Delapan)
Alamat	: Samata

Bermaksud melakukan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana. Adapun judul skripsi :

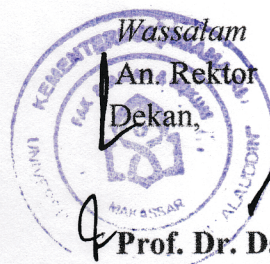
"Tinjauan Hukum Islam Tentang Doi' Nai' dalam Perkawinan Adat Amma Towa Desa Tanah Towa Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba"

Dengan Dosen Pembimbing : 1. Dr. Muhammad Sabri. M. Ag.

2. Drs. H. Syamsuddin R., M. Hi.

Untuk maksud tersebut kami mengharapkan kiranya kepada mahasiswa yang bersangkutan dapat diberi izin untuk melakukan penelitian di Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba. Terhitung 05 Mei s/d 05 Juni.

Demikian harapan kami dan terimah kasih.



Prof. Dr. Darussalam, M. Ag.

NIP. 19621016199031003

Tembusan :

Yth. Rektor UIN Alauddin Makassar Di Samata Gowa.



PEMERINTAH KABUPATEN BULUKUMBA
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
(BALITBANGDA)

Alamat : Jalan Durian Nomor 2 Bulukumba, Telp. (0413) 81102 Kode Pos 92511

Bulukumba, 2 Mei 2017

Nomor : 231/BALITBANGDA/IV/2017
Lampiran : -
Perihal : Izin Penelitian

Kepada
Yth. Kepala Desa Tanah Towa
Kec. Kajang
di
Kassi

Berdasarkan Surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan) Provinsi Sulawesi Selatan Makassar Nomor:5691/S.01P/P2T/04/2017, tanggal 27 April 2017, perihal Izin Penelitian maka yang tersebut di bawah ini:

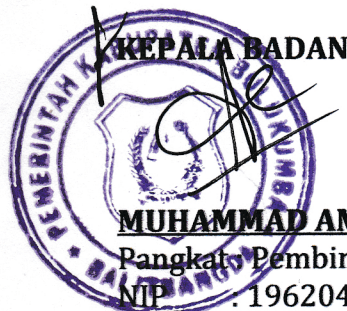
Nama : **SUMARNI**
Nomor Pokok : 10100113108
Program Studi : Peradilan
Alamat : Jl. H.M. Yasin Limpo No. 36, Samata-Gowa

Bermaksud melakukan penelitian/pengambilan data di Desa Tanah Towa Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba dalam rangka Penyelesaian Tugas Akhir (Skripsi) dengan judul **"TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG DOI' NAI' DALAM PERKAWINAN ADAT AMMA TOWA DESA TANAH TOA KECAMATAN KAJANG KABUPATEN BULUKUMBA"** yang akan berlangsung pada tanggal 5 Mei s.d. 5 Juni 2017.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, pada prinsipnya kami mengizinkan yang bersangkutan untuk melaksanakan kegiatan tersebut dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Mematuhi semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengindahkan adat istiadat yang berlaku pada masyarakat setempat;
2. Tidak mengganggu keamanan/ketertiban masyarakat setempat;
3. Penelitian/pengambilan data tidak menyimpang dari izin yang diberikan;
4. Melaporkan hasil pelaksanaan penelitian/pengambilan data serta menyerahkan 1 (satu) eksemplar hasilnya kepada Bupati Bulukumba Cq.Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kab. Bulukumba;
5. Surat izin ini akan dicabut atau dianggap tidak berlaku apabila yang bersangkutan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tersebut di atas, atau sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan kegiatan penelitian/pengumpulan data dimaksud belum selesai.

Demikian surat izin ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



MUHAMMAD AMAL, SE., M.Si.

Pangkat: Pembina Tk. I

NIP. 19620416 199303 1 004

Tembusan:

1. Bupati Bulukumba di Bulukumba (sebagai laporan);
2. Dekan Fak. Syria'ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar di Makassar;
3. Arsip.



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
BIDANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN

Nomor : 5691/S.01P/P2T/04/2017
Lampiran : -
Perihal : Izin Penelitian

Kepada Yth.
Bupati Bulukumba

di-

Tempat

Berdasarkan surat Dekan Fak. Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar Nomor : SI.1/PP.00.17/1769/2017 tanggal 27 April 2017 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

N a m a : **SUMARNI**
Nomor Pokok : 10100113108
Program Studi : Peradilan
Pekerjaan/Lembaga : Mahasiswa(D3)
Alamat : Jl. Muh. Yasin Limpo No. 36 Samata, Sungguminasa-Gowa

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka penyusunan Karya Tulis Ilmiah, dengan judul :

**" TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG DOI" NAI DALAM PERKAWINAN ADAT AMMA TOWA DESA
TANAH TOWA KECAMATAN KAJANG KABUPATEN BULUKUMBA "**

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. **05 Mei s/d 05 Juni 2017**

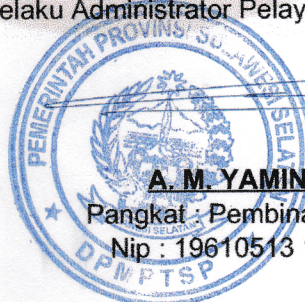
Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami **menyetujui** kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar
Pada tanggal : 27 April 2017

A.n. GUBERNUR SULAWESI SELATAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN

Selaku Administrator Pelayanan Perizinan Terpadu



A. M. YAMIN, SE., MS.

Pangkat : Pembina Utama Madya

Nip : 19610513 199002 1 002

Tembusan Yth

1. Dekan Fak. Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar di Makassar;
2. *Pertinggal.*





**PEMERINTAH KABUPATEN BULUKUMBA
KECAMATAN KAJANG
DESA TANAH TOWA**

Sekretariat : Jln. Pancasila Sakti No. 1 Balagana Telp :... Tanah Towa, 92574

SURAT KETERANGAN PENELITIAN
Nomor : 71 /SKP/DTT/VI/2017

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : **S A L A M**
Jabatan : Kepala Desa Tanah Towa

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama Lengkap : SUMARNI
Nim : 10100113108
Program Studi : Peradilan
Alamat : Jl. H.M.Yasin Limpo No.36, Samata- Gowa

Benar telah mengadakan penelitian di Desa Tanah Towa Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba dalam rangka penyelesaian tugas akhir (Skripsi) dengan judul **"TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG DOI' NAI' DALAM PERKAWINAN ADAT AMMATOA DESA TANAH TOWA KECAMATAN KAJANG KABUPATEN BULUKUMBA"** yang dilaksanakan pada tanggal 05 Mei s/d 05 Juni 2017.

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tanah Towa, 06 Juni 2017

KEPALA DESA TANAH TOWA




S A L A M

PENGESAHAN DRAFT/PROPOSAL SKRIPSI

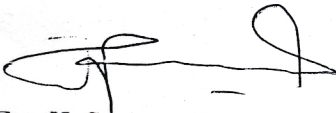
Draft skripsi yang berjudul, "Tinjauan Hukum Islam Tentang Doi' Nai' dalam Perkawinan Adat Amma Towa Desa Tanah Towa Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba". yang disusun oleh Sumarni, Nim: 10100113108 mahasiswa Prodi Hukum Acara Peradilan dan Kekeluargaan Jurusan Peradilan pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam seminar draft/proposal skripsi yang diselenggarakan pada hari Selasa tanggal 25 April 2017 M, bertepatan dengan 28 Djumadil Akhir 1438 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk melaksanakan penelitian.

Makassar, 25 April 2017 M
28 Djumadil Akhir 1438 H

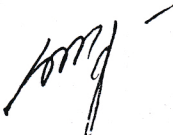
Pembimbing I


Dr. Muhammad Sabri, M.Ag.
NIP. 196707141992031005

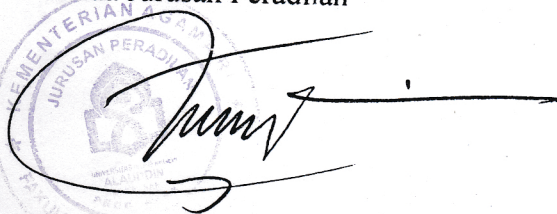
Pembimbing II


Drs. H. Syamsuddin R., M.Hi.
NIP. 195612311987011001

Disahkan oleh:
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum


Prof. Dr. Darussalam, M.Ag.
NIP. 19621016199031003

Disetujui oleh:
Ketua Jurusan Peradilan


Dr. H. Supardin, M.H.I.
NIP. 196503021994031003

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulisan proposal Saudara Sumarni, NIM: 10100113108, Mahasiswa Prodi Hukum Acara Peradilan dan Kekeluargaan Jurusan Peradilan pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, setelah meneliti dan mengoreksi secara seksama proposal skripsi yang berjudul, "Tinjauan Hukum Islam Tentang Doi' Nai' Dalam Perkawinan Adat Amma Towa Desa Tanah Towa Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba", memandang bahwa proposal skripsi ini tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk diseminarkan (seminar proposal).

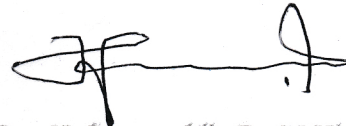
Makassar, 17 April 2017

Pembimbing I,



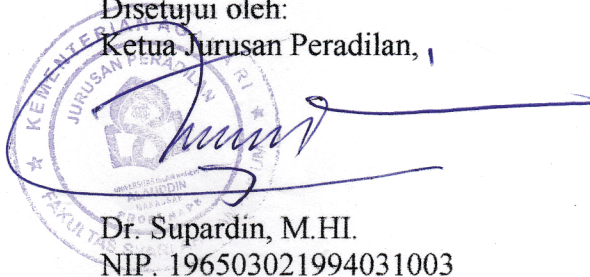
Dr. Muhammad Sabri, M.Ag..
NIP. 196707141992031005

Pembimbing II,



Drs. H. Syamsuddin R., M.Hi.
NIP. 195612311987011001

Disetujui oleh:
Ketua Jurusan Peradilan,



Dr. Supardin, M.HI.
NIP. 196503021994031003

PERSETUJUAN PEMBIMBNG/PENGUJI

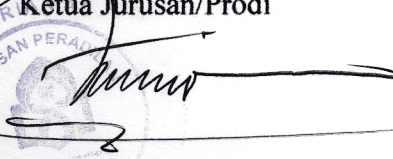
Skripsi yang berjudul, "Tinjauan Hukum Islam tentang *Doi' Nai'* dalam Perkawinan Adat *Ammatoa* Desa Tanah Towa Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba", yang disusun oleh Sumarni, NIM: 10100113108, mahasiswa Prodi Hukum Acara Peradilan dan Kekeluargaan Jurusan Peradilan pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang seminar hasil yang diselenggarakan pada hari Selasa, 13 Juni 2017 M, bertepatan dengan tanggal 10 Ramadan 1438 H, dinyatakan telah diperiksa secara saksama, diteliti, dan disetujui untuk dimunãqasyahkan.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk diproses lebih lanjut.

Makassar, 24 Juli 2017 M
29 Syawal 1438 H

Penguji I	: Drs. Hadi Daeng Mapuna, M.Ag.	(.....)
Penguji II	: Andi Intan Cahyani, S.Ag., M.Ag	(.....)
Pembimbing I	: Dr. Muhammad Sabri, M.Ag.	(.....)
Pembimbing II	: Drs. H. Syamsuddin R, M.H.I.	(.....)

Disetujui oleh:
Ketua Jurusan/Prodi


Dr. H. Supardin, M.H.I.
NIP. 196503021994031003



RIWAYAT HIDUP

SUMARNI lahir di Desa Tanah Towa Dusun Balagana Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba Sulawesi Selatan, 02 Juni 1993. Pada tahun 2007 tamat di SDN 115 Balagana dan pada tahun 2010 tamat di SMPN 3 Kajang tapi sekarang diubah menjadi SMPN 21 Bulukumba, dan Pada tahun 2013 tamat SMAN 2 Kajang tapi sekarang diubah menjadi SMAN 13 Bulukumba. Kemudian saya melanjutkan pendidikan di UIN Alauddin Makassar Jurusan Peradilan Agama Fakultas Syari'ah dan Hukum. Saat ini masih dalam tahap proses menyelesaikan kuliah untuk mendapatkan gelar sarjana.